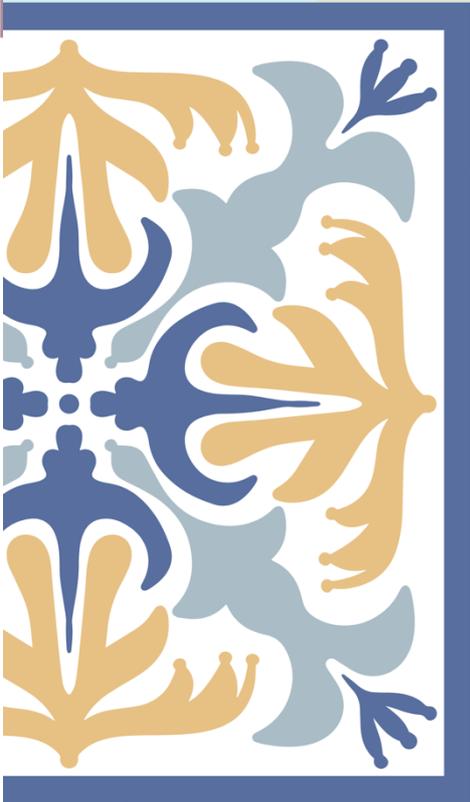




BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2024



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan ini mencakup berbagai capaian, tantangan, serta rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari kontribusi dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk data, masukan, maupun evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai referensi dan acuan untuk penyempurnaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masa mendatang. Kami berharap hasil laporan ini dapat turut mendukung upaya peningkatan kinerja kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 15 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Sani Alhusain'.

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
Ketua Pelaksana RB 2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan dan Sasaran.....	3
C. Dasar Hukum.....	3
D. Sistematika Laporan	4
BAB II	6
REFORMASI BIROKRASI SETJEN DPR RI.....	6
A. Profil	6
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	7
C. <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI 2020-2024	8
D. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	13
BAB III.....	16
Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2024	16
A. Reformasi Birokrasi General	16
B. Reformasi Birokrasi Tematik.....	129
BAB IV	144
PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Rekomendasi.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Tujuan Setjen DPR RI	6
Gambar 2. 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Setjen DPR RI.....	7
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Setjen DPR RI.....	8
Gambar 3. 1 Naskah Akademik Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.....	18
Gambar 3. 2 Dokumen Evaluasi Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Mekanisme Kerja pada Kegiatan Pembukaan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 202	21
Gambar 3. 3 Foto Kegiatan Visitasi SPBE Bersama Tim Asesor dan Perwakilan Kementerian PANRB.....	24
Gambar 3. 4 Foto Kegiatan Kickoff Meeting Penyusunan RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2027	27
Gambar 3. 5 Unit Kerja Penerima Penghargaan Implementasi SAKIP Setjen DPR RI Tahun 2024.....	33
Gambar 3. 6 Surat Keputusan Tim Pengaduan Masyarakat	51
Gambar 3. 7 Kegiatan paket meeting pembahasan mengenai optimalisasi tindak lanjut surat aspirasi dan pengaduan masyarakat pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD)	51
Gambar 3. 8 Paket meeting dalam rangka menindaklanjuti surat aspirasi dan pengaduan masyarakat pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD)	52
Gambar 3. 9 FGD Optimalisasi Dumas dan peningkatan kepercayaan kepada DPR RI	52
Gambar 3. 10 FGD Analisis Hukum di Bidang Hukum Tata Usaha	53
Gambar 3. 11 Publikasi Media Sosial dan Mekanisme Pengaduan DPR RI	53
Gambar 3. 12 Pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat oleh Anggota DPR RI	54
Gambar 3. 13 Aplikasi Artificial Intelligence for Recommendation Analysis (AIRA) pengaduan masyarakat DPR RI	55
Gambar 3. 14 Evidence bimbingan teknis pengelolaan pengaduan masyarakat	55
Gambar 3. 15 Foto Kegiatan Pelatihan Penggunaan Portal Satu Data DPR RI.....	79
Gambar 3. 16 Hasil Final Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024	99
Gambar 3. 17 Indeks Setjen DPR RI Tahun 2024	124
Gambar 3. 19 Foto Kegiatan Pengumuman Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI 2024	129
Gambar 3. 18 Foto Kegiatan Observasi Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI 2024	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Kegiatan Utama RB General Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024	8
Tabel 2. 2 Target Kegiatan Utama RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024	11
Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi dengan Target RB Tematik	13
Tabel 2. 4 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023	13
Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penyederhanaan Birokrasi : Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	16
Tabel 3. 2 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penyederhanaan Birokrasi : Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi.....	16
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.....	18
Tabel 3. 4 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	18
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	21
Tabel 3. 6 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	21
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	25
Tabel 3. 8 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	25
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Nilai SAKIP.....	28
Tabel 3. 10 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Nilai SAKIP	28
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan	34
Tabel 3. 12 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan	35
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	38
Tabel 3. 14 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	39
Tabel 3. 15 Hasil Evaluasi Unit Kerja yang tidak memperoleh predikat WBK/WBBM Tahun 2024.....	42
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	44
Tabel 3. 17 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	45
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan.....	47
Tabel 3. 19 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan.....	48

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	56
Tabel 3. 21 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	56
Tabel 3. 22 Nilai SPI KPK Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2024	65
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Indeks Reformasi Hukum (IRH).....	65
Tabel 3. 24 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Indeks Reformasi Hukum (IRH).....	66
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Arsip Digital: Tingkat Digitalisasi Arsip	72
Tabel 3. 26 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Arsip Digital: Tingkat Digitalisasi Arsip.....	72
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Data Statistik Sektorial: Indeks Pembangunan Statistik.....	75
Tabel 3. 28 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Data Statistik Sektorial: Indeks Pembangunan Statistik.....	75
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	79
Tabel 3. 30 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	80
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100
Tabel 3. 32 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	100
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	102
Tabel 3. 34 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA)..	102
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Opini BPK.....	106
Tabel 3. 36 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Opini BPK	106
Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.....	108
Tabel 3. 38 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	108
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Indeks Sistem Merit	112
Tabel 3. 40 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Indeks Sistem Merit	112
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAkhlahk	114
Tabel 3. 42 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAkhlahk.....	115
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Survei Kepuasan Masyarakat.....	118
Tabel 3. 44 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Survei Kepuasan Masyarakat ...	118
Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Indeks Pelayanan Publik	125
Tabel 3. 46 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik.....	125
Tabel 3. 47 Capaian RB Tematik Tema Pengentasan Kemiskinan	131
Tabel 3. 48 Capaian RB Tematik Tema Peningkatan Investasi.....	134

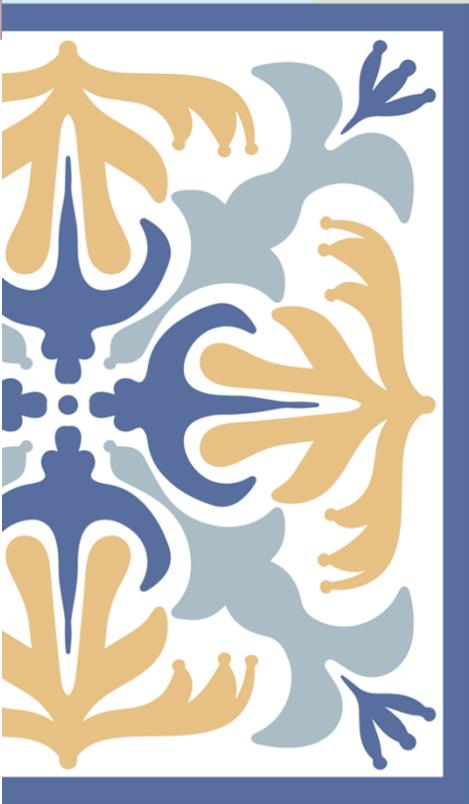


Tabel 3. 49 Capaian RB Tematik Tema Pengendalian Inflasi	137
Tabel 3. 50 Capaian RB Tematik Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	139
Tabel 3. 51 Capaian RB Tematik Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri	142



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Tren Nilai SPI Sekretariat Jenderal DPR RI (Sumber: jaga.id) 63



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup nasional, Reformasi Birokrasi telah ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi pembangunan Indonesia. Di tingkat kelembagaan, Sekretariat Jenderal DPR RI memegang peran penting sebagai motor penggerak untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI dalam melaksanakan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Oleh karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi suatu keniscayaan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada para anggota DPR RI, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dapat dilakukan secara optimal.

Pada tahun 2024, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI berfokus pada peningkatan efektivitas kelembagaan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan pelayanan publik. Langkah-langkah ini diambil untuk menjawab tantangan yang dihadapi organisasi, termasuk kebutuhan akan sistem kerja yang adaptif terhadap perubahan, tuntutan profesionalisme, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI juga dilaksanakan dalam kerangka yang mendukung visi reformasi pemerintah, yaitu mewujudkan birokrasi kelas dunia yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk mencapai visi tersebut, program-program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 diarahkan pada pencapaian sasaran strategis, termasuk penguatan tata kelola, inovasi pelayanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Namun begitu, Sekretariat Jenderal DPR RI menghadapi tantangan unik dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, mengingat fungsi utama lembaga ini adalah mendukung pelaksanaan tugas DPR RI sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu, Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI harus dirancang dengan pendekatan yang selaras dengan kebutuhan DPR RI, sehingga menghasilkan keluaran yang relevan dan mendukung optimalisasi kerja legislatif.

Dalam konteks tahun 2024, dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia turut memengaruhi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kondisi ini menuntut adanya respons yang cepat dan tepat melalui kebijakan dan program yang adaptif serta inovatif. Dengan demikian, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja DPR RI secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI juga dirancang untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya. Langkah ini mencerminkan semangat Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus melakukan perbaikan demi mewujudkan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dokumen laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program-program strategis di tahun 2024. Laporan ini memuat capaian, tantangan, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan Reformasi Birokrasi di masa mendatang. Melalui laporan ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang telah diambil Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagai bahan evaluasi program-program Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan, dan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi di tahun berikutnya. Dengan begitu, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional.

Adapun sasaran dari penyusunan Laporan ini adalah:

1. Mengidentifikasi capaian, hambatan, dan tantangan dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan publik dan akuntabilitas kelembagaan;
3. Meningkatkan transparansi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan program dan kegiatan kepada para pemangku kepentingan;
4. Memberikan data dan informasi yang akurat kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan terkait Reformasi Birokrasi.

C. Dasar Hukum

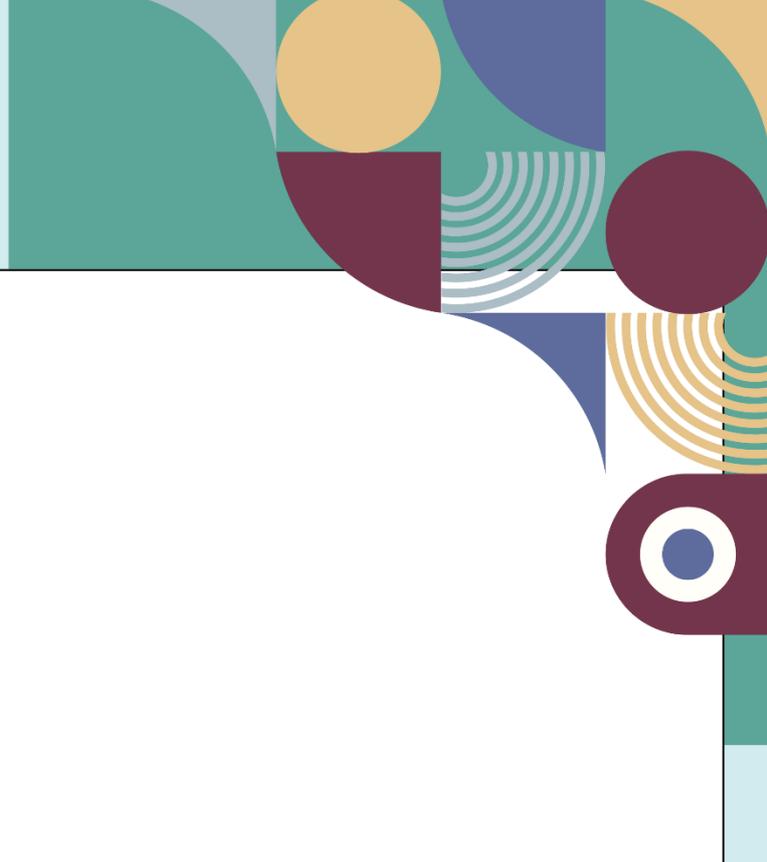
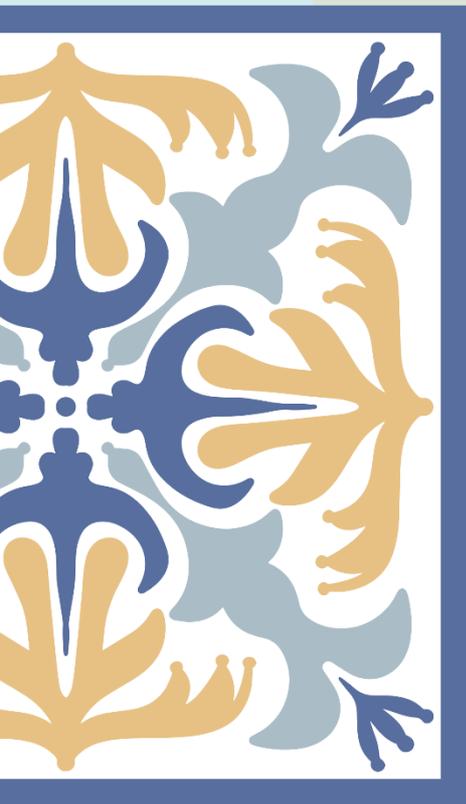
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;



2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024.

D. Sistematika Laporan

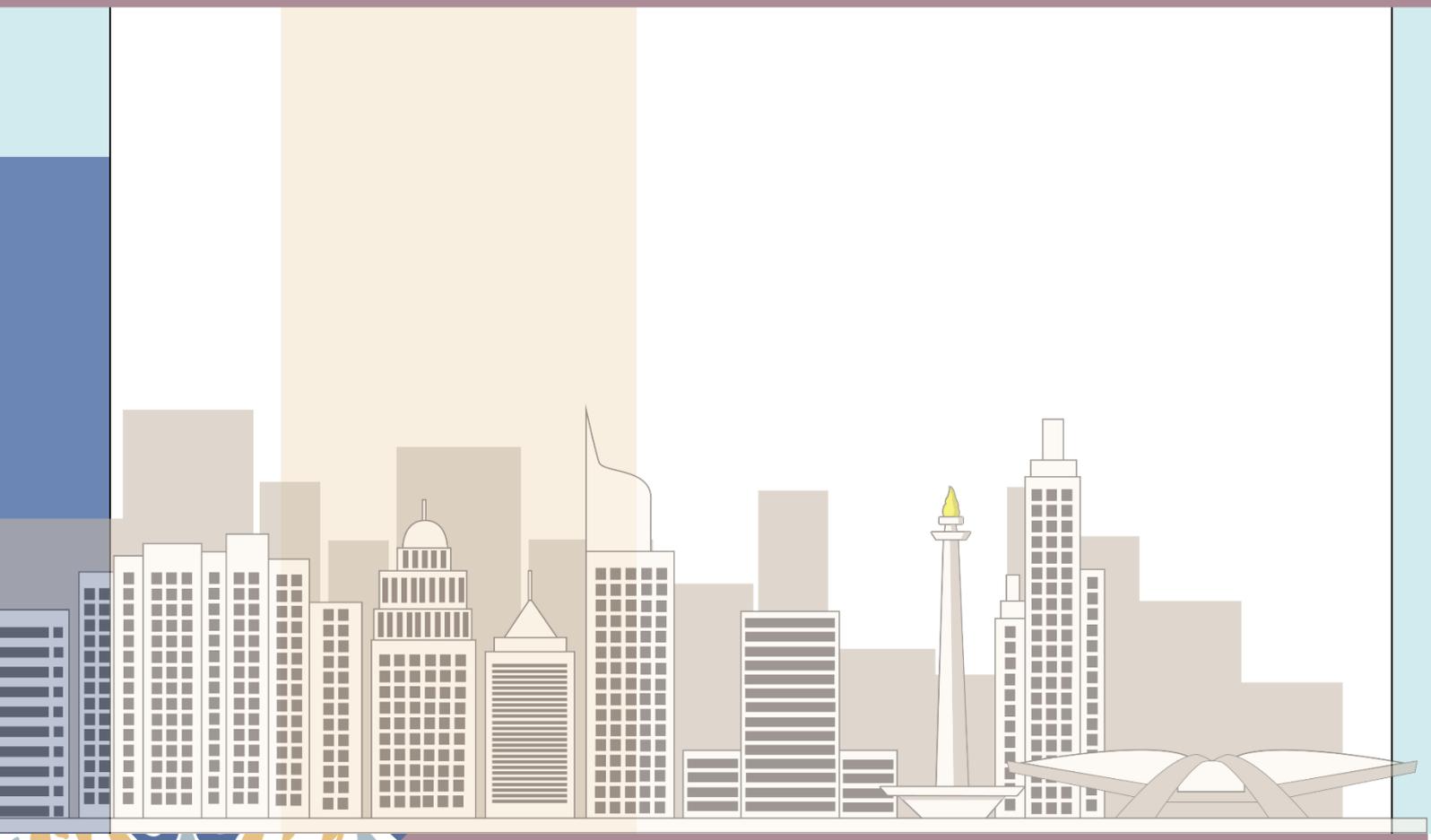
- BAB I** Pendahuluan
BAB II Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI
BAB III Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023
BAB IV Penutup
DAFTAR PENGHARGAAN



BAB II

REFORMASI BIROKRASI

SETJEN DPR RI



BAB II

REFORMASI BIROKRASI SETJEN DPR RI

A. Profil

REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



VISI

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

- Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI;
- Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI.

MISI

Sasaran Strategis

1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas;
3. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

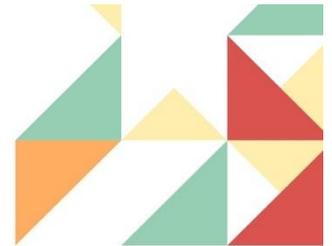
Tujuan

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi DPR RI;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Gambar 2. 1 Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Tujuan Setjen DPR RI

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi



Kedudukan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Tugas

Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian.

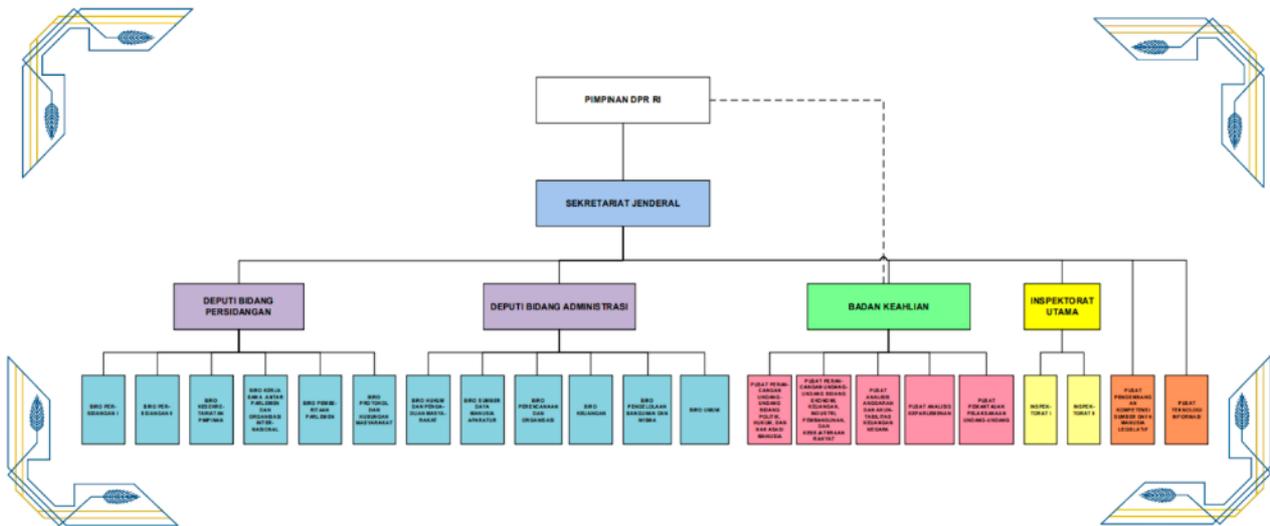
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI;
- Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPR RI;
- Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPR RI; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada DPR RI.

Gambar 2. 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Setjen DPR RI

Struktur Organisasi



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Setjen DPR RI

C. Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 (Perubahan) dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2264/SEKJEN/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024. Tabel di bawah ini merupakan Target Kegiatan Utama RB General dan RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024.

Tabel 2. 1 Target Kegiatan Utama RB General Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2023	Target 2024	Penanggungjawab
1.	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	26,98	26,98	Biro Perencanaan dan Organisasi

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2023	Target 2024	Penanggungjawab
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4	Biro Perencanaan dan Organisasi
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3.57	3.6	Pusat Teknologi Informasi
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	1	3	Pusat Teknologi Informasi
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	91,88	92	Biro Perencanaan dan Organisasi
		Nilai SAKIP	67,46	76	Biro Perencanaan dan Organisasi
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1	2	Inspektorat Utama
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,27	3,28	Inspektorat Utama
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2	4	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
8.	Penguatan Upaya	Survei Penilaian Integritas (SPI)	59,7	78,9	Inspektorat Utama

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2023	Target 2024	Penanggungjawab
	Pencegahan Korupsi				
9.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	98,8	99	Pusat Perancangan Undang-Undang
10.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	98,38	98,38	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
11.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	1,51	2,6	Pusat Teknologi Informasi
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	47,8	72	Biro Umum
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	5	5	Biro Keuangan
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	94,44	95	Inspektorat Utama
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,26	96	Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi
		Indeks Pengelolaan Aset	3,6	3,7	Biro Keuangan
14.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	363	363	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
15.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	61,7	75	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2023	Target 2024	Penanggungjawab
16.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	93,13	93,25	Pusat Analisis Keparlemenan
		Indeks Pelayanan Publik	4,4	4,51	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Tabel 2. 2 Target Kegiatan Utama RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2023	Target 2024
1.	Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dukungan substansi berupa kajian atau analisis, untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR dalam rangka mendukung pemerintah merealisasikan target penurunan kemiskinan	Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan		19 Dokumen
		Tersedianya dukungan substansi berupa kajian, analisis, atau Naskah Akademik untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR dalam rangka mendukung pemerintah merealisasikan target penurunan kemiskinan	Persentase kajian, analisis, atas Naskah Akademik terkait fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran		100%
2.	Realisasi Investasi	Tersedianya dukungan secara substansi kepada DPR RI dalam menghasilkan regulasi yang memberikan kemudahan berusaha dan/atau melakukan	Persentase penyelesaian Naskah Akademik yang terkait investasi	100%	100%

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2023	Target 2024
		perubahan regulasi yang menghambat investasi melalui penyusunan Naskah Akademik			
		Tersedianya dukungan secara substansi kepada DPR RI dalam pembahasan anggaran dan program K/L terkait investasi melalui penyusunan analisis pagu indikatif	Jumlah analisis pagu indikatif K/L terkait investasi pada siklus pembahasan APBN		1 Dokumen
3.	Digitalisasi Pemerintahan	Tersedianya layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang terintegrasi	Meningkatnya kepuasan DPR RI atas layanan teknologi informasi		3,22
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tersedianya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri		40%
5.	Pengendalian Inflasi	Tersedianya dukungan substansi kepada DPR RI dalam pembahasan target asumsi dasar ekonomi makro (inflasi) sebagai bagian dalam pembahasan RUU APBN dan mendukung pengawasan pelaksanaan inflasi yang terjaga rendah dan stabil melalui penyusunan analisis/kajian	Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan		28 Dokumen

Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi dengan Target RB Tematik

NO.	TEMA	BASELINE 2023	TARGET 2024
1.	Pengentasan kemiskinan	1,14	1
2.	Realisasi Investasi	1,63	1
3.	Digitalisasi Pemerintahan	1,14	1
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	1,56	1
5.	Pengendalian Inflasi	1,63	1

D. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada Reformasi Birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 adalah **78,8** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023

PENILAIAN	BOBOT	NILAI
RB General	100	71,7
RB Tematik	10	7,1
Indeks RB	110	78,8 (BB)

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak dibandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

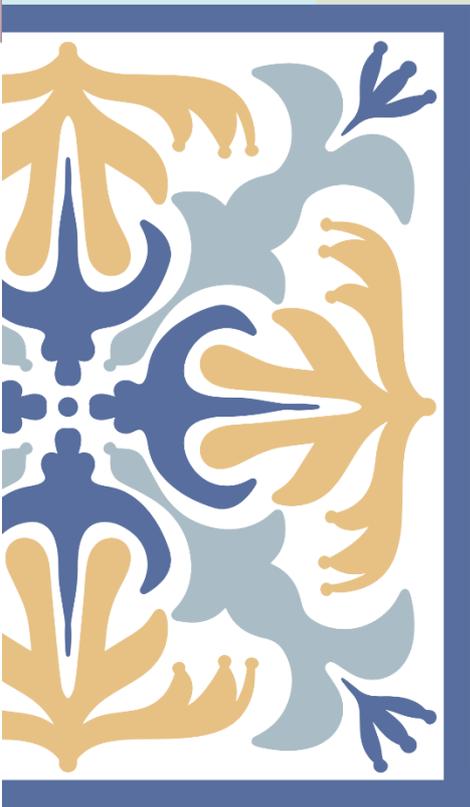
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian PANRB memberikan catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu:

Catatan

1. Beberapa Kegiatan Utama *Mandatory* yang ada dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional belum ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada *baseline* tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi Nasional (Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023);
3. Rencana Aksi yang disusun belum berorientasi pada prioritas permasalahan utama;
4. Terdapat *Output* atas Rencana Aksi yang belum relevan dan cukup sebagai ukuran keberhasilan Rencana Aksi;
5. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.

Rekomendasi

1. Memastikan Kegiatan Utama *Mandatory* yang ada dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
2. Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada *baseline* tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi Nasional (Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023);
3. Memastikan Rencana Aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama;
4. Memastikan Indikator *Output* atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan;
5. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektivitas serta efisiensi.

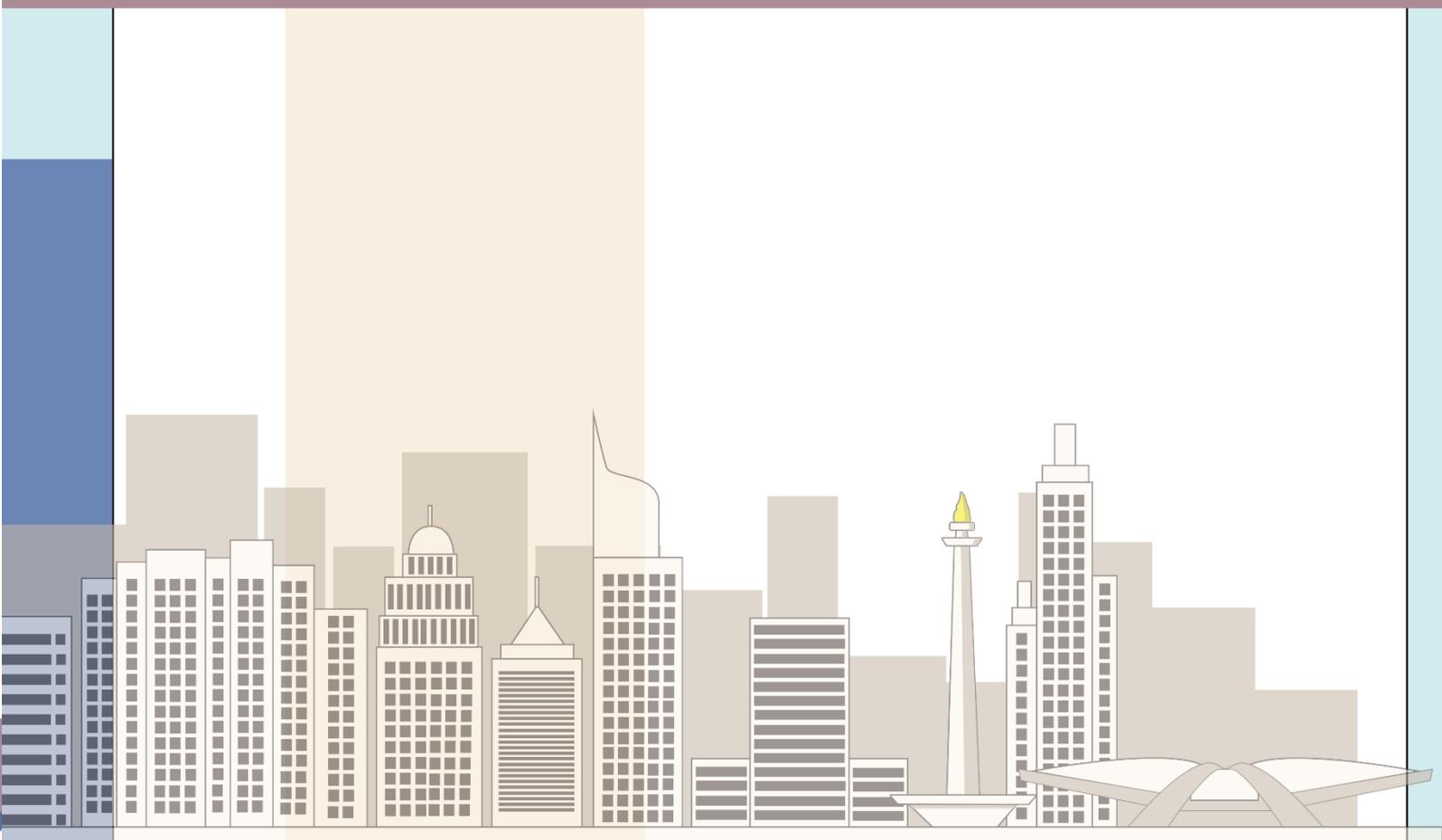


BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

SETJEN DPR RI TAHUN 2024



BAB III

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2024

A. Reformasi Birokrasi General

1. Penyederhanaan Birokrasi : Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
26,98	26,98	-	Biro Perencanaan dan Organisasi

Tabel 3. 2 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penyusunan kajian penyederhanaan birokrasi	Jumlah kajian penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Penyusunan kajian penataan organisasi berisi alternatif penataan organisasi yang diutamakan untuk pembentukan sekretariat bagi Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat.
Penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi	Jumlah surat usulan penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Naskah Akademik Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/13164/OT.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024,

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Hal: Usulan Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
Penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi	Jumlah Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja	-	-	-	1	Dalam proses penetapan struktur organisasi diawali dengan pelaksanaan ekspose penataan organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui daring hari Jumat, 1 November 2024.

Berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Oktober 2024, menyatakan bahwa telah ditetapkan penambahan Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Maka Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI, melaksanakan proses penataan organisasi untuk menindaklanjuti amanat/*mandatory* tersebut melalui penyusunan kajian penataan organisasi, penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi, penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi.

Proses penyusunan kajian penataan organisasi berisi alternatif penataan organisasi yang diutamakan untuk pembentukan sekretariat bagi Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Setelah penyusunan kajian diselesaikan, dilanjutkan dengan penyusunan Naskah Akademik penataan organisasi. Naskah akademik tersebut menjadi lampiran surat usulan penataan organisasi yang disampaikan kepada Menteri PANRB pada tanggal 28 Oktober 2024.

Tindak lanjut dari penyampaian surat usulan tersebut adalah pembahasan dengan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2024. Pada pembahasan tersebut, Kementerian PANRB dapat menyetujui usulan penataan organisasi dan akan disampaikan secara formal melalui surat. Persetujuan penataan organisasi disampaikan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/1486/M.KT.01/2024 tanggal 8 November 2024 hal Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI yang selanjutnya disahkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6

Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 3. 1 Naskah Akademik Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
3	4	-	Biro Perencanaan dan Organisasi

Tabel 3. 4 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI telah dilaksanakan evaluasi atas Keputusan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum.
Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi	-	-	-	1	Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan evaluasi kelembagaan.
Implementasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan implementasi sistem dan mekanisme kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Terkait implementasi pelaksanaan Keputusan tentang Sistem dan Mekanisme Kerja ini, maka seluruh unit kerja mengadministrasikan pelaksanaan tugas <i>squad team</i> dalam bentuk Keputusan (baik untuk Tim yang mempunyai dampak anggaran/honor maupun yang tidak berdampak anggaran/honor) dan Surat Tugas. Dalam

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						<p>rangka pelaporan pelaksanaan sistem kerja dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah disampaikan naskah <i>softcopy</i> Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan beberapa contoh Keputusan/Surat Tugas yang menjadi gambaran pelaksanaan <i>squad team</i> di Sekretariat Jenderal DPR RI.</p>

Pelaksanaan sistem kerja baru dimulai dengan melakukan evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bentuk PDCA (*plan, do, check, act*) dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan sistem kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Evaluasi dilakukan oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Setelah dilakukan evaluasi, dilakukan sosialisasi sistem kerja baru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI pada acara Pembukaan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Tahapan berikutnya adalah implementasi sistem kerja baru. Pada kegiatan ini, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan konsultasi dengan Kementerian PANRB untuk memperoleh informasi terkait jenis dokumen penetapan tim kerja. Informasi ini dipandang perlu untuk menyamakan persepsi dokumen dan informasi apa saja yang harus dicantumkan untuk menetapkan pembentukan tim kerja.

Berdasarkan hasil konsultasi, seluruh unit kerja mengadministrasikan pelaksanaan tugas *squad team* dalam bentuk Keputusan (baik untuk Tim yang

mempunyai dampak anggaran/honor maupun yang tidak berdampak anggaran/honor) dan Surat Tugas. Pengadministrasian ini digunakan dalam penilaian penyederhanaan struktur organisasi dan sistem kerja. Dalam penilaian tersebut juga diberikan contoh Keputusan/Surat Tugas yang menjadi gambaran pelaksanaan Tim Kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 3. 2 Dokumen Evaluasi Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Mekanisme Kerja pada Kegiatan Pembukaan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional

a. Indeks SPBE

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
3.57	3.6	4,23	Pusat Teknologi dan Informasi

Tabel 3. 6 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Meningkatkan penerapan manajemen aset TIK	Penerapan dan dokumentasi pengelolaan aset TIK yang fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak	1	1	1	1	Pengelolaan aset TIK sudah menggunakan aplikasi DigitAll yang sudah mencakup seluruh siklus pengelolaan aset TIK untuk memperkuat akurasi data serta

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris.
Meningkatkan penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR)	Peningkatan ruang lingkup UPR berdasarkan prioritas risiko SPBE	1	1	1	1	Telah dilakukan penyelarasan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta telah dilakukan perbaikan <i>form Risk Register</i> TI yang digunakan dalam pengelolaan risiko agar lebih selaras dengan prinsip manajemen risiko yang efektif.
Menyusun dan menerapkan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK	Tersusunnya kebijakan/pedoman perubahan layanan SPBE dengan fokus pada perubahan layanan TIK yang diterapkan di DPR RI	1	1	1	1	Telah dilakukan penyusunan kebijakan Penerapan Manajemen Layanan Teknologi informasi yang dirancang berdasarkan Standar ISO 20000 yang di dalamnya terdapat panduan dalam mengelola setiap perubahan terkait layanan TIK.
Mengukur utilitas aplikasi/sistem informasi	Hasil evaluasi utilitas pemanfaatan	1	1	1	1	Telah dilakukan penyusunan laporan hasil identifikasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	aplikasi/sistem informasi di DPR RI					kebermanfaatan aplikasi yang mencakup evaluasi komprehensif terhadap efektivitas dan kontribusi berbagai aplikasi dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.
Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2027	RITIK dan Peta Jalan TIK Tahun 2025-2027 yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional	1	1	1	1	Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2027 yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional

Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPR RI mencatat pencapaian yang signifikan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memperoleh Indeks SPBE sebesar 4,23. Angka ini menunjukkan peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 3,57. Dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021-2024 sebesar 3,6, capaian ini melampaui ekspektasi dengan persentase keberhasilan 117,5%, dan mendapatkan predikat "Memuaskan".

Keberhasilan ini menempatkan Sekretariat Jenderal DPR RI di peringkat pertama dari delapan lembaga dalam kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara. Selain itu, capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional Indeks SPBE yang berada di angka 3,12, menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah berhasil menerapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan digital.

Capaian ini tidak terlepas dari upaya sistematis yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Sejak bulan Juli, proses pengumpulan *evidence* untuk penilaian SPBE mulai dilakukan dengan melibatkan berbagai unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Proses evaluasi dilakukan dengan tahapan penilaian mandiri dengan pengiriman *evidence* pada aplikasi Tauval SPBE Kementerian PANRB di tanggal 25 Agustus

2024, evaluasi tahap *interview* dengan Tim Penilai pada 28 Oktober 2024, serta pelaksanaan visitasi penilaian pada 19 November 2024 di DPR RI.



Gambar 3. 3 Foto Kegiatan Visitasi SPBE Bersama Tim Asesor dan Perwakilan Kementerian PANRB

Dalam mencapai target ini, berbagai langkah strategis telah dilakukan, di antaranya penerapan sistem DigitAll dalam pengelolaan aset TIK untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data inventaris. Selain itu, Sekretariat Jenderal DPR RI juga melakukan penyelarasan Surat Keputusan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020, serta memperbaiki *form Risk Register* TI guna memastikan pengelolaan risiko yang lebih efektif. Upaya lain yang dilakukan termasuk penyusunan kebijakan Manajemen Layanan Teknologi Informasi berbasis Standar ISO 20000, serta evaluasi terhadap pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung tugas organisasi.

Selain kebijakan dan regulasi, berbagai inovasi teknologi juga diterapkan dalam mendukung pencapaian Indeks SPBE. Beberapa di antaranya adalah penggunaan OneDrive pada 365.dpr.go.id sebagai media berbagi dokumen secara digital untuk mengurangi penggunaan kertas, serta pelaksanaan rapat koordinasi SPBE secara virtual guna meningkatkan efisiensi komunikasi antar unit kerja. Selain itu, pengadaan lisensi Visualisasi Data Analitik, pengembangan *machine learning* berbasis GPU, serta audit dan sertifikasi ISO 27001 juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kapabilitas teknologi informasi di DPR RI.

Keberhasilan dalam implementasi SPBE ini merupakan bukti nyata komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Meskipun telah mencapai hasil yang sangat baik, upaya pengembangan dan perbaikan akan terus dilakukan agar implementasi SPBE semakin optimal. Dengan

strategi yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari seluruh unit kerja terkait, Sekretariat Jenderal DPR RI siap menghadapi tantangan digitalisasi di masa mendatang.

b. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
1	3	3	Pusat Teknologi dan Informasi

Tabel 3. 8 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melakukan evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE	Evaluasi dan rekomendasi eksistensi pengaturan arah pemanfaatan Arsitektur SPBE sebagai pedoman keterpaduan/ integrasi SPBE	1	1	1	1	Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2027 yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional
Melakukan revaluasi aktual atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI	Pembaharuan Arsitektur SPBE As-Is DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	1	1	1	1	Telah dilakukan pemutakhiran data Arsitektur SPBE As-Is yang menggambarkan kondisi eksisting arsitektur SPBE di lingkungan DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2
Menyusun Arsitektur SPBE To-Be DPR RI	Penyusunan arsitektur SPBE To-Be DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	-	-	-	1	Telah dilakukan penyusunan Arsitektur SPBE To-Be pada aplikasi SIA SPBE V2 dengan adanya penambahan pada domain proses bisnis dan domain aplikasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melakukan <i>gap analysis</i> dan menyusun Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	Penyusunan Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	-	-	-	1	Telah dilakukan penyusunan Peta Rencana SPBE yang diselaraskan dengan hasil <i>gap analysis</i> dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Tahun 2025-2027. <i>Gap analysis</i> dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi arsitektur SPBE As-Is dengan visi dan arsitektur SPBE To-Be yang telah disusun dan menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan peta rencana.

Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil mencapai nilai 3 dalam Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, naik signifikan dari nilai 1 pada tahun 2023 dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang pesat dalam tata kelola arsitektur SPBE, memastikan bahwa kebijakan internal DPR RI selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional serta mendukung pencapaian Indeks Pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari langkah strategis, DPR RI telah melakukan evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE, yang berfokus pada penguatan regulasi dan integrasi layanan berbasis elektronik. Evaluasi ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk pemanfaatan arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam memastikan keterpaduan sistem yang lebih baik. Salah satu hasil utama dari evaluasi ini adalah penyusunan dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) 2025-2027, yang menjadi landasan strategis dalam pengembangan teknologi informasi DPR RI secara lebih terstruktur dan sesuai standar nasional.



Gambar 3. 4 Foto Kegiatan *Kickoff Meeting* Penyusunan RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2027

Sebagai langkah penting dalam peningkatan tata kelola digital, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pemutakhiran data Arsitektur SPBE As-Is melalui aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB. Pembaruan ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi eksisting arsitektur SPBE di DPR RI, yang menjadi dasar dalam proses analisis serta pengambilan keputusan berbasis data. Dengan pemutakhiran ini, DPR RI dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem yang telah berjalan serta merancang strategi transformasi yang lebih efektif.

Lebih lanjut, DPR RI juga telah menyusun Arsitektur SPBE To-Be, yang merupakan perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan diterapkan dalam beberapa tahun ke depan. Penyusunan ini tidak hanya menggambarkan visi pengelolaan sistem elektronik DPR RI, tetapi juga mencakup penambahan domain proses bisnis dan domain aplikasi, yang memastikan pengelolaan SPBE lebih terstruktur dan terintegrasi.

Untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dan visi ke depan, DPR RI juga telah melakukan *gap analysis*, yang menghasilkan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman implementasi jangka panjang. *Gap analysis* ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi Arsitektur SPBE As-Is dan Arsitektur SPBE To-Be, serta menyusun rekomendasi strategis guna memperkuat infrastruktur digital DPR RI. Penyusunan peta rencana ini menjadi langkah konkret dalam memastikan bahwa setiap pengembangan teknologi informasi sejalan dengan kebutuhan organisasi dan standar nasional yang berlaku.

4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi

a. Nilai SAKIP

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Nilai SAKIP

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
67,46	76	68,92	Biro Perencanaan dan Organisasi

Tabel 3. 10 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Nilai SAKIP

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penguatan Perencanaan Kinerja	Tersusunnya <i>Cascading</i> dan Pohon kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021	-	1	-	-	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal DPR RI rencananya akan ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2024 bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2025. Hanya saja berdasarkan hasil diskusi dan arahan pimpinan, penandatanganan PK akan diundur hingga 8 Januari 2025. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang rencananya akan diselesaikan di TW IV diundur hingga awal TW I Tahun 2025. Oleh karena itu alokasi anggaran yang direncanakan sebesar
	Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja 2024 berdasarkan Laporan Kinerja 2023	-	1 (50%)	1 (50%)	-	
	Tersusunnya	-	-	-	1	

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2025					Rp. 26.250.000 tidak terserap pada TW IV.
	Tersusunnya Rencana Aksi 2024 Eselon I dan II	26	-	-	-	
Penguatan Pengukuran Kinerja	Pembangunan aplikasi E-SAKIP	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	Pengembangan aplikasi E-SAKIP merupakan tindak lanjut atas salah satu rekomendasi Kementerian PANRB untuk memperbaiki proses pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Solusi yang ditawarkan agar seluruh data tersebut dapat terkumpul, konsisten, dan terintegrasi adalah mengembangkan suatu sistem informasi. Pengembangan aplikasi E-SAKIP juga dibangun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aplikasi tersebut akan dilengkapi dengan 4 (empat) komponen

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja.
	Updating data Aplikasi SIMATA untuk pengelolaan rotasi mutasi	-	1	-	1	Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mengelola dan sinkronisasi data manajemen karir pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI. Sistem manajemen karir tersebut meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target. Penentuan talenta yang akan mengisi jabatan target tersebut dilakukan berdasarkan pemeringkatan potensial dan kinerja melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung terselenggaranya Sistem Merit di Sekretariat Jenderal DPR RI.
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan	-	-	1	1	Biro Perencanaan dan Organisasi telah menyelenggarakan Rapat Kerja Monitoring

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Evaluasi Capaian Kinerja					dan Evaluasi pada tanggal 4-7 Juli 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk menjamin proses penganggaran disusun berbasis kinerja, berkualitas dan akuntabel. Rapat tersebut juga bermanfaat untuk mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
Penguatan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja 2023 di Tingkat Eselon I dan II yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014	26	-	-	-	Dalam menjawab rekomendasi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data, monitoring, dan evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI telah menggunakan metode <i>Balanced Scorecard</i> (BSC) untuk pengukuran kinerja unit kerja yang diatur melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1459/SEKJEN/2024.
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan	-	1	1	1	Pengembangan dan pemanfaatan metode ini bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi dan menjadi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Tahun 2024					rujukan evaluasi setiap semester / 6 (enam) bulan.
Optimalisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tersusunnya Dokumen Evaluasi SAKIP Internal	-	-	5	-	Inspektorat sebagai penanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun laporan tindak lanjut atas evaluasi APIP. Hal ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana implementasi SAKIP telah dilakukan dalam rangka mendorong agar Sekretariat Jenderal DPR RI mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
	Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi APIP	-	-	-	1	
	Pemberian <i>reward</i> atas penilaian SAKIP unit kerja	-	-	1	-	

Kementerian PANRB telah menerbitkan Lembar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/667/AA.05/2024. Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai evaluasi akuntabilitas kinerja untuk tahun 2024 sebesar 68,92 dengan predikat “Baik” (B). Realisasi tersebut belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 76,00 dengan predikat “Baik” (B), sehingga untuk mencapai target tersebut masih terdapat selisih 7,08 poin atau sekitar 9,32%. Meskipun demikian, realisasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten jika dibandingkan capaian tahun 2023, yaitu sebesar 67,46 “Baik” (B) atau meningkat 1,46 poin.



Gambar 3. 5 Unit Kerja Penerima Penghargaan Implementasi SAKIP Setjen DPR RI Tahun 2024

Penentuan target tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan atas penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 2924/OT.05/10/2023. SPTJM menetapkan target sebesar 75 dengan predikat “Sangat Baik” (BB) yang lebih tinggi 4 (empat) poin dibandingkan target pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI perubahan yang kedua, yakni sebesar 71 dengan predikat “Sangat Baik” (BB). Tindak lanjut dari penandatanganan tersebut adalah dengan melakukan penyesuaian target tahun 2024 pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI perubahan ketiga menjadi sebesar 76 dengan predikat “Sangat Baik” (BB).

Secara umum realisasi per-komponen tahun 2024 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan poin terbesar dicapai oleh komponen evaluasi sebesar 0,63 poin, dan disusul komponen pelaporan sebesar 0,59 poin. Komponen perencanaan memperoleh peningkatan paling rendah, yaitu sebesar 0,02 poin disusul oleh komponen pengukuran sebesar 0,22 poin. Mengacu kepada data di atas, maka dapat disimpulkan antara lain:

- Peningkatan poin yang tinggi pada komponen pelaporan merupakan hasil dari peningkatan kualitas laporan kinerja tahunan. Sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan untuk memastikan agar Laporan Kinerja (LKj) seluruh unit kerja selaras dengan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Walaupun dengan catatan masih ada beberapa unit kerja yang masih belum memenuhi ketentuan di atas.
- Peningkatan poin pada komponen evaluasi juga didorong oleh komitmen Inspektorat Utama untuk memastikan monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara berkelanjutan dalam memastikan peningkatan yang konsisten pada

nilai evaluasi internal AKIP seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Walaupun terkait tindak lanjut atas rekomendasi tersebut masih membutuhkan beberapa perbaikan.

- Peningkatan pada komponen perencanaan masih jauh dari target capaian yang diharapkan. Hasil rekomendasi atas komponen ini masih serupa dengan tahun sebelumnya yang menandakan belum ada perubahan mendasar sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Terutama pada aspek perumusan *cascading* kinerja organisasi dan perumusan rencana aksi kinerja tahunan.
- Peningkatan poin pada aspek pengukuran juga masih belum memenuhi target yang diharapkan karena belum tersedia sistem informasi pengelolaan kinerja yang terintegrasi, baik pada level organisasi, maupun pengelolaan kinerja individu.

Oleh karena itu, fokus rencana aksi terpenting untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025 antara lain:

- Merumuskan kembali *cascading* kinerja organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjenjangan Kinerja yang disusun dengan mengidentifikasi *critical success factor* (csf).
- Penetapan kerangka regulasi pengelolaan kinerja organisasi sebagai dasar pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan kinerja yang dapat diandalkan. Sistem informasi ini penting sebagai jawaban atas rekomendasi perbaikan pada dua komponen sekaligus, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan bobot yang mencapai 60% dari keseluruhan penilaian atas AKIP. Sistem informasi tersebut ditargetkan dapat segera diselesaikan dan ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2025, dan sistem informasi tersebut rencananya akan dilaksanakan sosialisasi pada bulan April tahun 2025.

b. Indeks Perencanaan Pembangunan

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
91,88	92	94,42	Biro Perencanaan dan Organisasi

Tabel 3. 12 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penguatan Perencanaan	Tersusunnya Revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024	1	-	-	-	Seiring Perubahan Struktur Organisasi dipandang penting untuk melakukan penyesuaian Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024
	Tersusunnya Rencana Kerja DPR RI Tahun 2024	1	-	-	-	Rencana Kerja disusun secara rutin tiap tahun seiring dengan siklus perencanaan anggaran
	Tersusunnya Revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	1	-	-	-	Sehubungan dengan adanya revisi Renstra 2020-2024. Sekretariat Jenderal DPR RI, maka dalam rangka menelaraskan informasi kinerja DPR RI, Rencana Kerja juga harus direvisi. Hal ini dalam rangka menelaraskan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja DPR RI
Peningkatan Keselarasan Informasi Kinerja	Tersusunnya Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	50%	50%	-	-	Pohon kinerja disusun simultan dengan penyusunan revisi Rencana Strategis DPR RI 2020-2024. Pohon kinerja digunakan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja DPR RI dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen Rencana Strategis. Sehingga jika dokumen Rencana Strategis disahkan secara otomatis pohon kinerja juga sudah disahkan
	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024	1	-	-	-	Penyusunan Perjanjian Kinerja disusun simultan dengan penyusunan Rencana Kerja dan disahkan/ditandatangani pada bulan Desember 2023
	Terlaksananya Sinkronisasi/Penyelarasan Rencana Kerja dengan RKAKL TA 2024	-	-	1	-	Pelaksanaan sinkronisasi/penyelarasan antara Rencana Kerja pada aplikasi KRISNA dengan RKAKL pada aplikasi SAKTI dimaksudkan untuk memenuhi penilaian pada indikator kesesuaian pada pagu anggaran RKAKL dengan pagu anggaran Rencana Kerja KL. Dimana pada tahun berjalan RKAKL pada aplikasi SAKTI

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						bersifat dinamis dikarenakan proses revisi anggaran

Pada tahun 2024, Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) memperoleh nilai sebesar 94,42 dengan predikat “Sangat Baik” yang dilaporkan melalui Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor B-23679/SES/PP.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, Hal: Penyampaian Informasi Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2024. Nilai ini merupakan peningkatan sebesar 2,57 poin dari tahun 2023 dengan nilai 91,88, dan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 92.

Penilaian IPPN didasarkan oleh 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi, Sinkronisasi, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja yang masing-masingnya terdiri dari beberapa indikator. Berdasarkan sistem penilaian tersebut, pada tahun 2024 telah disusun 2 (dua) rencana aksi dalam pelaksanaan IPPN Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu penguatan perencanaan dan peningkatan keselarasan informasi kinerja. Pada rencana aksi penguatan perencanaan, terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu tersusunnya Revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024, tersusunnya Rencana Kerja DPR RI Tahun 2024, dan tersusunnya Revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Ketiga indikator rencana aksi tersebut telah seluruhnya terlaksana pada Triwulan I Tahun 2024 sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kegiatan revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 dilakukan seiring dengan perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 sendiri telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan IV Tahun 2023.

Kemudian untuk kegiatan penyusunan Rencana Kerja DPR RI Tahun 2024 pada dasarnya telah dimulai pada bulan April 2023 dengan dikeluarkannya Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2024, sampai dengan bulan Desember 2023 seiring dengan diterbitkannya DIPA DPR TA 2023. Beriringan dengan siklus perencanaan anggaran, Rencana Kerja juga selalu dilakukan perbaikan atau penyesuaian mengikuti perubahan anggaran yang terjadi sepanjang bulan April hingga Desember.

Selanjutnya, kegiatan penyusunan revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 diawali dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor T/14770/PR.03/12/2023 perihal Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2023. Sebagai rangkaian agenda penyusunan Revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, dilaksanakan *Trilateral Meeting* Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024 antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Agenda kemudian dilanjutkan dengan revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024 Satker Sekretariat Jenderal pada Aplikasi KRISNA pada tanggal 24 Maret 2024, sehingga revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024 telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rencana aksi peningkatan keselarasan informasi kinerja juga terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu tersusunya Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, dan terlaksananya Sinkronisasi/Penyelarasan Rencana Kerja dengan RKAKL TA 2024. Rencana aksi ini telah terlaksana pada Triwulan I s.d. III Tahun 2024.

Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI disusun secara simultan dengan penyusunan revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 pada Triwulan IV Tahun 2023. Pohon Kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja DPR RI dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen Rencana Strategis. Sedangkan penyusunan Perjanjian Kinerja disusun simultan dengan penyusunan Rencana Kerja dan disahkan/ditandatangani pada bulan Desember 2023. Dengan begitu, Pohon Kinerja pun juga telah disahkan.

5. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
1	2	0,75	Inspektorat Utama

Tabel 3. 14 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penetapan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1	-	-	-	Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK adalah sebagai berikut: 1. Biro Persidangan I; 2. Biro Kesekretariatan Pimpinan; 3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur; 4. Pusat Teknologi Informasi; 5. Biro Pemberitaan Parlemen; 6. Biro Keuangan; 7. Biro Perencanaan dan Organisasi; 8. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.
Pendampingan pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama	Jumlah unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang didampingi pembangunannya oleh Inspektorat Utama	4	4	-	-	Empat unit kerja yang telah selesai dilaksanakan pendampingan pembangunannya pada Triwulan I, yakni: 1. Biro Protokol dan Humas; 2. Biro Kesekretariatan Pimpinan; 3. Biro Pemberitaan Parlemen; 4. Biro Persidangan I. Empat unit kerja yang telah selesai dilaksanakan pendampingan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						pembangunannya pada Triwulan II, yakni: 1. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur; 2. Biro Keuangan; 3. Pusat Teknologi Informasi; 4. Biro Perencanaan dan Organisasi.
Pembangunan dan Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi ZI	LKE unit ZI	-	-	6	-	Penilaian Mandiri LKE ZI dilaksanakan oleh Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Pemberitaan Parlemen, Pusat Teknologi Informasi, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Biro Keuangan dan telah di- <i>submit</i> hasilnya pada tanggal 19 Juli 2024
Melaksanakan survei penilaian persepsi korupsi dan survei penilaian kualitas pelayanan	Laporan survei	-	6	-	-	Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari Enam unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK, yakni Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Teknologi Informasi, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Biro Keuangan telah dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Laporan SPAK dan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						SPKP masing-masing unit kerja.
Evaluasi unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021	Dokumen persyaratan pengajuan unit ZI	-	-	1	-	Dokumen Persyaratan Pengajuan Unit ZI Menuju WBK terdiri atas: 1. LKE PMPZI; 2. Surat Pernyataan TLHP; 3. Survei Mandiri Unit ZI yang diusulkan Menuju WBK; dan 4. SPTJM ZI.
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke TPN	Surat pengajuan unit kerja menuju WBK	-	-	1	-	Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK kepada Kementerian PANRB didasarkan pada Surat Nomor B/8405/OT.05/7/2024.
Proses evaluasi oleh TPN	1. Hasil Konfirmasi Progress Evaluasi ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Surat Tanggapan dari Kementerian PANRB RB terkait Hasil Konfirmasi Progress Evaluasi ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2024.
	2. LHE Kementerian PANRB	-	-	-	1	LHE Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dari Kementerian PANRB diperoleh pada tanggal 5 Desember 2024.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian dilakukan oleh Kementerian PANRB yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024, terdapat 6 (enam) unit kerja yang diusulkan menjadi ZI menuju WBK untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPN) Kementerian PANRB. Keenam unit kerja tersebut adalah Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Teknologi Informasi, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Biro Keuangan. Hal ini didasarkan pada Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/8405/OT.05/7/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/100/PW.04/2024 tentang Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024, keenam unit kerja yang diajukan tersebut belum berhasil memperoleh predikat WBK pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 15 Hasil Evaluasi Unit Kerja yang tidak memperoleh predikat WBK/WBBM Tahun 2024

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1	Unit/satuan kerja diusulkan	6	6	0
2	Unit/satuan kerja mendapat predikat	0	0	0
3	Unit/satuan kerja belum memenuhi kriteria	6	6	0

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan ZI untuk kementerian/lembaga diukur berdasarkan capaian keberhasilan pembangunan ZI dalam rata-rata tiga tahun terakhir dengan rentang penilaian 0 – 3.

Menurut keterangan dari pihak Kementerian PANRB dalam Paket *Meeting* Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 di Hotel Fairmont Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 memperoleh skor 0,75. Skor tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan skor tahun

2023 sebesar 1 dan tidak mencapai target yang ditetapkan pada SPTJM sebesar 2. Salah satu faktor ketidaktercapaian target ini dikarenakan tidak adanya unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK pada tahun 2022 dan 2024. Selain itu, masih terdapat beberapa catatan terkait pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK yang diperoleh dari Portal Reformasi Birokrasi Nasional PANRB untuk setiap unit kerja yang diusulkan, di antaranya:

1. Biro Persidangan I

- a. Dokumen rencana aksi belum mencakup target prioritas pembangunan WBK;
- b. Bukti dukung monitoring dan evaluasi triwulanan belum disajikan dengan lengkap;
- c. Penilaian risiko yang dilakukan belum mencakup risiko integritas;
- d. Belum adanya bukti dukung pengaduan tahun 2023-2024;
- e. Identifikasi pegawai dalam benturan kepentingan belum disertai rincian tugas;
- f. Belum adanya Bukti Lapor LHKPN Tahun 2023;
- g. Belum adanya eviden perbandingan layanan yang telah dipermudah dan meningkatkan survei kepuasan masyarakat.

2. Biro Kesekretariatan Pimpinan

- a. Dokumen rencana aksi belum menetapkan isu strategis, PIC, dan target waktu;
- b. Belum adanya Laporan Monitoring ZI yang dilakukan per semester;
- c. Belum adanya rencana kerja tahunan;
- d. Belum adanya Laporan Monitoring Pengelolaan Gratifikasi dan SOP terkait;
- e. Belum adanya Laporan Implementasi Mitigasi Risiko;
- f. Belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. Belum adanya unit yang menangani benturan kepentingan dan menyusun laporan implementasinya;
- h. Belum adanya eviden perbandingan kondisi *before-after* dari layanan yang telah dilakukan inovasi.

3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Dokumen rencana aksi belum menggambarkan target-target prioritas ZI;
- b. Belum adanya monitoring dan evaluasi atas rencana aksi yang disusun;
- c. Belum disampaikannya bukti dukung terkait pengaduan masyarakat;
- d. Belum adanya eviden perbandingan *before-after* dari layanan yang telah dilakukan inovasi;
- e. Belum disampaikannya sampel SPT/Bukti Lapor Pajak bagi pegawai yang tidak wajib lapor LHKPN.

4. Pusat Teknologi Informasi

- a. Dokumen rencana aksi belum menggambarkan target-target prioritas ZI;
- b. Monitoring dan evaluasi rencana aksi belum dilakukan secara optimal;
- c. Penilaian risiko yang dilakukan belum mencakup risiko integritas;
- d. Belum adanya SOP Penanganan Pengaduan pada unit kerja;

- e. Belum tergambarkannya dampak nyata dari peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan.

5. Biro Keuangan

- a. Belum adanya laporan atas penanganan gratifikasi, laporan atas penanganan benturan kepentingan, rekapitulasi atas penanganan pengaduan layanan yang terbaru;
- b. Belum dilampirkannya sampel SPT/Bukti Lapor Pajak untuk pegawai yang tidak wajib lapor LHKPN.
- c. Belum adanya eviden perbandingan *before-after* dari layanan yang telah dilakukan inovasi.

6. Biro Pemberitaan Parlemen

- a. Dokumen rencana aksi belum menggambarkan target prioritas berdasarkan isu unit kerja;
- b. Belum dilakukannya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi yang disusun;
- c. Penilaian risiko yang dilakukan belum mencakup risiko integritas;
- d. Belum adanya eviden pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari implementasi mitigasi risiko;
- e. Belum adanya eviden perbandingan kondisi *before-after* dari layanan yang telah dilakukan inovasi.

Secara keseluruhan, pimpinan unit kerja dan Tim Penilai Internal (TPI) perlu memastikan enam area perubahan dalam pembangunan ZI telah dilengkapi data dukung yang baik serta andal dan memastikan implementasinya telah berjalan dengan baik. Untuk menanggulangnya, PIC ZI telah menyusun rencana aksi yang dimonitoring setiap triwulan untuk menilai efektivitas pelaksanaannya sehingga pada akhirnya pelaksanaan pembangunan ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat berjalan lebih optimal.

6. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
3,27	3,24	3,60	Inspektorat Utama

Tabel 3. 17 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi SPIP	-	-	2	-	Proses Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Terintegrasi telah dilaksanakan pada Mei 2024 dengan mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1100/SEKJEN/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Penjaminan Kualitas atas Hasil PM Maturitas SPIP Terintegrasi baru dilaksanakan pada Agustus 2024 dengan mengacu pada ST 275/PI.03/VIII/2024.
Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya	Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024	-	-	1	-	Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 telah dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Pembuatan <i>cascading</i> kinerja berdasarkan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i>	Dokumen <i>Cascading</i> Kinerja	-	1	-	-	Penyusunan kinerja Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 telah disusun berdasarkan <i>logical</i>

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						<i>framework dan success factor.</i>
Analisis risiko digunakan sebagai dasar bahan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan secara berkala mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan baik.	Laporan Monitoring Penanganan Risiko	-	-	-	1	Monitoring Penanganan Risiko Sekretariat Jenderal DPR RI telah dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Laporan Monitoring Penanganan Risiko Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.
Memantau dan mengoptimalkan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang, temuan terkait pengelolaan BMN, dan temuan terkait ketaatan.	Laporan atas Pemantauan dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK	-	-	1	-	Pemantauan dan optimalisasi tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK Tahun 2024 telah dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Laporan Pemantauan TLHP BPK RI Semester I T.A. 2024.

Skor maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian dilakukan oleh BPKP dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Surat BPKP Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor PE.09.02/LHP-154/D202/02/2024 tanggal 9 Desember 2024, Hal: Laporan Hasil

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, disampaikan bahwa Skor Maturitas SPIP Tahun 2024 adalah 3,60 dengan kategori pada Level 3. Skor Maturitas SPIP pada Level 3 dapat diartikan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendaliannya telah dilaksanakan namun belum efektif. Skor tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor tahun 2023 sebesar 3,27 dan telah melampaui target yang ditetapkan pada SPTJM sebesar 3,24.

Peningkatan skor dari 3,27 menjadi 3,60 tersebut dikarenakan adanya peningkatan nilai pada komponen Penetapan Tujuan dan Struktur & Proses. Pada komponen Penetapan Tujuan, peningkatan nilai dapat terjadi karena telah dilakukannya perbaikan pada penetapan target kinerja dimana setiap target kinerja telah dirincikan ke dalam bentuk yang lebih *measurable* yakni nilai/skor. Sedangkan pada komponen Struktur dan Proses, peningkatan nilai dikarenakan eviden yang dilampirkan telah mengalami peningkatan secara kualitas dimana beberapa kebijakan dan implementasi terkait struktur dan proses telah dilakukan evaluasi. Beberapa di antaranya adalah evaluasi atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Kedua peraturan tersebut juga telah direvisi dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 21 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2747/SEKJEN/2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, komunikasi yang efektif serta upaya sosialisasi layanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi telah dilakukan secara terstruktur dan berkala.

Faktor keberhasilan dari tercapainya target Skor Maturitas SPIP Tahun 2024 merupakan wujud kerja nyata Inspektorat Utama dalam menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluasi dari BPKP yaitu dengan memenuhi sebanyak 92,59% *Area of Improvement* dari penilaian SPIP tahun 2023, pendampingan intensif yang dilakukan kepada unit kerja penyelenggara SPIP, serta partisipasi aktif dari para PIC SPIP di Tingkat Eselon I dalam melakukan penilaian mandiri.

7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
2	4	5	Biro Hukum dan Dumas

Tabel 3. 19 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pembangunan aplikasi/ <i>dashboard</i> pengaduan berbasis <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	Dibangunnya aplikasi/ <i>dashboard</i> pengaduan berbasis <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	-	-	1	-	Aplikasi pengaduan berbasis <i>Artificial Intelligence</i> (AI) yang diberi nama <i>Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics</i> (AIRA) telah di <i>launching</i> pada Triwulan III tahun 2024
Publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI	Diunggahanya konten media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI ke media sosial Biro Hukum dan Dumas	-	1	-	1	Publikasi media sosial berhasil dilaksanakan dengan dua kali unggahan terkait syarat pengaduan masyarakat dan maklumat pelayanan pengaduan masyarakat pada Triwulan II dan IV
Pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat oleh anggota DPR RI	Dibuatnya video testimoni pengaduan masyarakat oleh Anggota DPR RI	-	-	1	-	Pembuatan video testimoni berjalan sesuai rencana pada bulan September 2024
Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan terintegrasinya Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	2	-	-	-	Terdapat 3 (tiga) tim yang dibuat untuk pengelolaan pengaduan masyarakat, dimana ketiganya dibuat pada Triwulan I. Adapun tim tersebut diantaranya adalah Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan

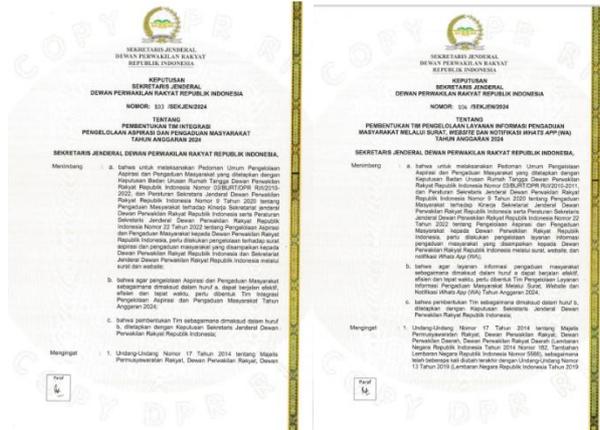
Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sekretariat Jenderal DPR RI; Tim Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Dumas; serta Tim Pengelolaan Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat melalui Surat, <i>Website</i> dan Notifikasi Whatsapp
Koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan Masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi pengelolaan aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi pengelolaan aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	1	1	2	-	Koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan Masyarakat berhasil dilaksanakan dalam tiga triwulan, diantaranya melalui acara rapat dan paket <i>meeting</i> yang membahas tindak lanjut pengaduan masyarakat serta melakukan kunjungan pengaduan masyarakat ke Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur
<i>Focus Group Discussion</i> Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sebagai Dukungan Peningkatan Kualitas	Tercapainya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	1	-	1	-	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada TW I dan TW III melalui FGD dengan tema Optimalisasi Tindak Lanjut Dumas Sebagai

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Tugas dan Fungsi Pengawasan DPR RI						Dukungan Untuk Melakukan Kegiatan Pengawasan DPR RI serta FGD dengan tema Analisis Hukum di Bidang Tata Usaha Negara (TUN)
Bimbingan teknis pengelolaan pengaduan masyarakat	Tercapainya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	-	-	-	1	Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan dengan peserta Pejabat Penghubung SP4N Lapor dan pengelola aplikasi Sidumas yang terdiri dari Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024 melalui kegiatan Bimbingan Teknis Tindak Lanjut atas Penanganan Aduan oleh Pejabat Penghubung Dumas Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada tahun 2020, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* SP4N LAPOR! Tahun 2020-2024 yang menjadi acuan bagi penyelenggara layanan publik dalam mewujudkan penyempurnaan dan/atau optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Dalam rangka mewujudkan *roadmap* tersebut, dibuat beberapa rencana aksi guna meningkatkan pengelolaan SP4N LAPOR! Tahun 2024. Adapun rencana aksi yang telah dibuat diantaranya:

I. Pembentukan tim pengelolaan pengaduan masyarakat dan tim kerja integrasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun koordinasi yang baik dalam pengelolaan dan integrasi pengaduan masyarakat. Diharapkan melalui rencana aksi ini, masyarakat mendapatkan pelayanan pengaduan yang lebih optimal. Pada Triwulan I Tahun 2024, rencana aksi tersebut berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan *evidence* sebagai berikut :



Gambar 3. 6 Surat Keputusan Tim Pengaduan Masyarakat

II. Koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam tim kerja integrasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat

Koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam tim dilaksanakan secara berkala dalam dua periode, di Triwulan I dan II dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan paket *meeting* pembahasan mengenai optimalisasi tindak lanjut surat aspirasi dan pengaduan masyarakat pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dilaksanakan dengan *evidence* sebagai berikut:



Gambar 3. 7 Kegiatan Paket *Meeting* Pembahasan Mengenai Optimalisasi Tindak Lanjut Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

- Kegiatan paket *meeting* dalam rangka menindaklanjuti surat aspirasi dan pengaduan masyarakat pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang dilaksanakan dengan *evidence* sebagai berikut:



Gambar 3. 8 Paket *Meeting* Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

III. *Focus Group Discussion* (FGD) optimalisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai dukungan peningkatan kualitas tugas dan fungsi pengawasan DPR RI

Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola pengaduan di Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas), dilakukan 2 (dua) kegiatan FGD di Triwulan I dan III dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan FGD Optimalisasi Dumas dan peningkatan kepercayaan kepada DPR RI. Kegiatan FGD ini dilakukan bersama pakar komunikasi Bapak S. Kunto Adi Wibowo, PhD yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai KOPI. FGD ini dilakukan agar staf Bagian Dumas memiliki wawasan yang lebih baik terkait dukungan dalam bidang pengawasan dan penanganan pengaduan. Kegiatan ini dilakukan melalui Kegiatan FGD Optimalisasi Dumas dan peningkatan kepercayaan kepada DPR RI. Adapun *evidence* dalam kegiatan ini sebagai berikut:



Gambar 3. 9 FGD Optimalisasi Dumas dan Peningkatan Kepercayaan Kepada DPR RI

- Kegiatan FGD Analisis Hukum di Bidang Hukum Tata Usaha

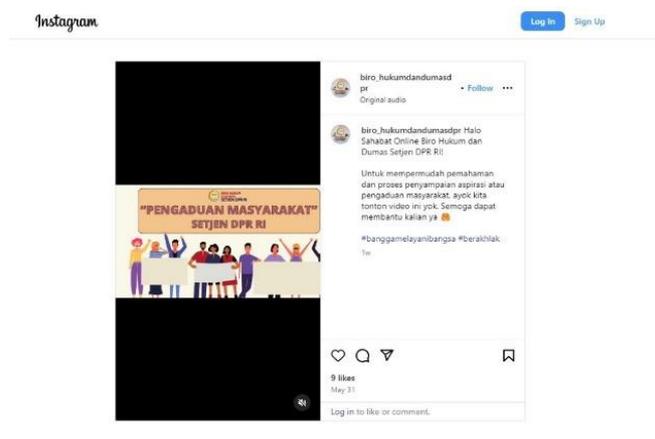
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas analisa pengaduan masyarakat, pengelola pengaduan membutuhkan pelatihan telaahan hukum agar *output* analisa pengaduan masyarakat dapat dibuat dengan baik dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Adapun FGD Analisis Hukum di Bidang Hukum Tata Usaha dilaksanakan selama tiga hari di Kota Yogyakarta dengan *evidence* sebagai berikut:



Gambar 3. 10 FGD Analisis Hukum di Bidang Hukum Tata Usaha

IV. Publikasi Media Sosial dan Mekanisme Pengaduan DPR RI

Kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan II dan IV, sesuai dengan target rencana aksi yang telah direncanakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunggah video tentang prosedur penyampaian pengaduan masyarakat melalui Instagram Biro Hukum dan Dumas, dengan *evidence* sebagai berikut:



Gambar 3. 11 Publikasi Media Sosial dan Mekanisme Pengaduan DPR RI

V. Pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat oleh Anggota DPR RI

Pembuatan video testimoni ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana pada Triwulan III, yang dapat diakses melalui link sebagai berikut:

- <https://drive.google.com/file/d/14HjrTk7Z3fXEdvpcMfjetqtC-AKWJ7iJ/view>
- <https://drive.google.com/file/d/1Lr313aqT543troWAmZeFqMB0kqgb/view> Tc1-

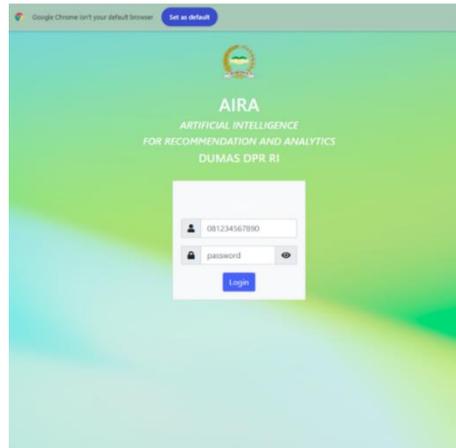
Adapun *evidence* dari pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat sebagai berikut:



Gambar 3. 12 Pembuatan Video Testimoni Pengaduan Masyarakat oleh Anggota DPR RI

VI. Pembuatan aplikasi *Artificial Intelligence for Recommendation Analysis* (AIRA) pengaduan masyarakat DPR RI

Bahwa *workflow* pengaduan masyarakat yang memerlukan analisis pengaduan membuat adanya penambahan waktu pengerjaan analisa pengaduan berpengaruh terhadap semakin panjangnya waktu penanganan pengaduan. Otomatisasi analisis pengaduan melalui *Artificial Intelligence* (AI) diharapkan membantu mempercepat penanganan pengaduan kepada masyarakat dan anggota DPR RI sebagai *stakeholders* Dumas. Adapun pembuatan AI Dumas DPR RI dilaksanakan sesuai target pada Triwulan III 2024, dengan *evidence* sebagai berikut:



Gambar 3. 13 Aplikasi *Artificial Intelligence for Recommendation Analysis* (AIRA) Pengaduan Masyarakat DPR RI

VII. Bimbingan teknis pengelolaan pengaduan masyarakat

Bimbingan teknis pengelolaan pengaduan masyarakat DPR RI dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat penghubung pengaduan masyarakat DPR RI tentang penggunaan aplikasi pengelolaan pengaduan masyarakat di DPR RI (Sidumas dan SP4N LAPOR). Kegiatan ini dilaksanakan sesuai target pada Triwulan IV, dengan *evidence* sebagai berikut:



Gambar 3. 14 *Evidence* Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

8. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
59,70	78,9	77,15	Inspektorat Utama

Tabel 3. 21 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melaksanakan Sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Edaran terkait kewajiban PPK dalam menyusun kertas kerja rencana umum pengadaan dan menginput Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP	Dokumen Rekapitulasi minimal 70% dari total nilai pengadaan telah diinput dalam Aplikasi SIRUP	1	-	-	-	Pagu Belanja Barang/Jasa 2024 yang telah diinput Biro/PPK sebesar 100%
Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait <i>e-purchasing</i> dan tata cara perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Persentase Peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Dilaksanakan pada 23 Februari 2024 dengan persentase kehadiran sebesar 75% (hadir 84 peserta dari total 112 undangan)

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melaksanakan sosialisasi <i>probity audit</i>	Persentase Peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Kegiatan sudah dilaksanakan pada 30 Mei 2024 dengan jumlah kehadiran menjadi 99,50% (hadir 402 orang dari total 404 peserta)
Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK dengan mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait penginputan data Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Aplikasi SIRUP	Persentase peserta yang hadir dalam bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	-	1	-	<p>Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi SPSE dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pencatatan PBJ Non e-Tendering dan Non <i>e-Purchasing</i> pada tanggal 19 sampai 21 Agustus 2024 dengan mengundang narasumber dari LKPP, dengan persentase kehadiran sebesar 83,33% (hadir 25 peserta dari total 30 undangan). Bimbingan teknis ini juga membahas terkait penginputan PBJ di SIRUP (daftar hadir, paparan narasumber, dan foto kegiatan terlampir).</p> <p>Untuk bimbingan teknis kepada PPK dilaksanakan dalam bentuk pendampingan setiap Triwulan oleh Biro Umum, khususnya Bagian Pengadaan</p>

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Barang dan Jasa (laporan singkat dan dokumentasi terlampir)
Melaksanakan pembinaan kepada vendor/penyedia dan internal Sekretariat Jenderal DPR RI terkait pengenalan e-katalog sektoral serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase vendor/penyedia yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	-	1	-	Telah terlaksana "Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Metode E-Purchasing dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI" pada 11 September 2024 dengan persentase kehadiran sejumlah 77,84% (hadir 151 peserta dari total 194 undangan)
Menyusun Rencana Aksi dari hasil evaluasi Sistem Merit di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023	Rencana Aksi terkait evaluasi Sistem Merit yang telah disusun dan diformalkan oleh Kepala Biro SDMA	-	1	-	-	Telah tersusun Rencana Aksi Tahun 2024 dari Hasil Evaluasi Sistem Merit Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023
Melakukan monitoring terkait tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari hasil	Minimal 50% dari total rekomendasi telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi Sistem Merit	-	1	-	-	Telah disusun Laporan Pelaksanaan Sistem Merit serta Laporan Pembangunan Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedua laporan ini sudah

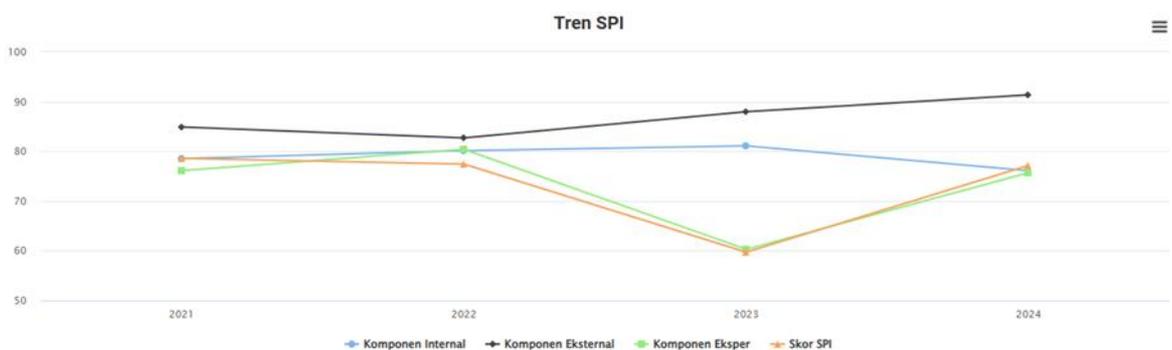
Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
evaluasi Sistem Merit						<p>menyampaikan tindak lanjut dan progress yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Merit.</p> <p>Untuk persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sudah di atas 50% dikarenakan rekomendasi yang belum hanyalah berupa pemberian tunjangan kinerja berdasarkan aspek kinerja</p>
Melakukan sosialisasi terhadap Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase Peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Telah terlaksana <i>Workshop</i> Manajemen Talenta kepada pada 25 Maret 2024 dengan persentase kehadiran sebesar 81,65 % (hadir 318 dari total 387 undangan)
Melaksanakan <i>workshop</i> tentang disiplin pegawai	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan <i>workshop</i> berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Dilaksanakan pada 27 Maret 2024 dengan persentase kehadiran sebesar 96,74% (hadir 178 peserta dari total 184 undangan)
Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan	-	1	-	-	Kegiatan sudah dilaksanakan pada 30 Mei 2024 dengan jumlah kehadiran menjadi 99,50% (hadir

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2021	teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan					402 orang dari total 404 peserta)
Menandatangani Pakta Integritas oleh calon pimpinan/pejabat di instansi	Minimal 50% dari total calon pimpinan/pejabat at instansi telah menandatangani Pakta Integritas sebelum memangku jabatannya	-	-	-	1	<p>Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 01A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV Sekretariat Jenderal DPR RI, setiap pejabat yang akan dilakukan pengangkatan jabatan, akan diukur beberapa aspek salah satunya adalah integritas. Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan Pakta Integritas sebelum pelantikan jabatan.</p> <p>Telah disusun nota dinas permintaan Pakta Integritas ke Biro SDMA, khususnya Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN.</p> <p>Telah didapatkan <i>sampling</i> Pakta Integritas dari beberapa unit kerja</p>
Melaksanakan evaluasi atas penanganan	Minimal 50% dari kasus benturan kepentingan	-	-	-	1	Telah disusun Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan Tahun 2024.

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
benturan kepentingan	telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama					Berdasarkan laporan, tidak terdapat pengaduan atas benturan kepentingan, baik pelaporan secara langsung maupun melalui WBS. Sehingga tidak ada kasus yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti
Melaksanakan sosialisasi pencegahan terkait kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi, pengaduan dan perlindungan terhadap pelapor	Peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Dilaksanakan pada Rabu, 3 April 2024 dengan persentase kehadiran sebesar 81,30% (hadir 100 peserta dari total 123 undangan)
Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	Minimal 50% dari kasus suap/gratifikasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama	-	-	1	1	Kegiatan monitoring dan evaluasi gratifikasi akan dilaksanakan setiap semester oleh Bagian Administrasi Inspektorat Utama. Untuk Semester I telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi gratifikasi pada Juli 2024. Untuk Semester II telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi gratifikasi pada Desember 2024.

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						<p>Telah terdapat dokumen Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Semester I Tahun 2024.</p> <p>Telah terdapat dokumen Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Semester II Tahun 2024</p>
Mengikutsertakan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan <i>e-Learning</i> KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	Minimal 50% dari total Tim UPG telah mengikuti <i>e-Learning</i> KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	-	-	Target penyelesaian minimal 15%	Target penyelesaian minimal 35%	<p>Telah dilaksanakan <i>e-Learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) yang dilaksanakan untuk Tim UPG pada tanggal 7-9 Oktober 2024 dengan persentase ketercapaian sebesar 51,22% (21 orang dari Tim UPG telah memperoleh sertifikat <i>e-learning</i> PPG dari total 41 orang Tim UPG), dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Triwulan III sejumlah 19,51% dari Tim UPG mengikuti Pelatihan <i>e-learning</i> KPK (8 dari 41 orang Tim UPG); Triwulan IV sejumlah 39,39% dari Tim UPG mengikuti Pelatihan <i>e-learning</i> KPK (13

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						dari 33 orang Tim UPG).
Melakukan sosialisasi kebijakan melalui Surat Himbauan terkait penyusunan laporan kegiatan tim untuk intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan honor kegiatan	Surat Himbauan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim	-	-	1	-	Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Biro Keuangan, telah disusun Surat Edaran untuk penyusunan laporan kegiatan tim sebagai bentuk pertanggungjawaban dari SK Tim dengan honor. Untuk penatausahaan dari Laporan Tim merupakan tanggung jawab PPK
Melaksanakan sosialisasi terkait perjalanan dinas kepada Tenaga Ahli	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Dilaksanakan pada 7 Maret 2024 dengan persentase kehadiran sebesar 99% (hadir 671 peserta dari total 676 undangan)



Grafik 3. 1 Tren Nilai SPI Sekretariat Jenderal DPR RI (Sumber: jaga.id)

Berdasarkan data dari situs jaga.id, Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mengukur tingkat integritas di berbagai institusi pemerintah. SPI menilai tiga komponen utama: internal, eksternal, dan pakar, serta mempertimbangkan faktor koreksi seperti fakta korupsi dan pelaksanaan SPI.

Peningkatan nilai SPI di Sekretariat Jenderal DPR RI dari 59,7 pada tahun 2023 menjadi 77,15 pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dalam aspek-aspek tersebut. Kenaikan sejumlah 17,45 poin ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan integritas internal, memperbaiki persepsi publik, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh para ahli.

Dengan nilai 77,15, Sekretariat Jenderal DPR RI tidak hanya melampaui skor SPI nasional tahun 2024 yang berada di angka 71,51, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi. Pencapaian ini sejalan dengan tujuan SPI yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong institusi pemerintah meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Meskipun nilai yang tercatat mencapai 77,15, jika dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dalam rangka Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sebesar 78,9, pencapaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan. Angka 77,15, meskipun menunjukkan performa yang cukup baik, masih berada di bawah target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya celah kecil yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pencapaian ke depan dapat lebih optimal. Perbedaan sebesar 1,75 mungkin terdengar kecil, namun dalam konteks tertentu, angka tersebut dapat menjadi indikator adanya potensi perbaikan atau penyesuaian yang perlu dilakukan, baik dalam hal strategi, perencanaan, maupun implementasi program untuk mencapai target yang lebih tinggi.

Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh penetapan berdasarkan capaian tahun 2022 yaitu 77,43, sedangkan untuk target tahun 2024 pada SPTJM tersebut tidak dilakukan revisi mengingat bahwa nilai SPI KPK di tahun 2023 adalah 59,7. Selain itu, hasil indeks integritas juga dipengaruhi oleh faktor koreksi yang mengurangi secara keseluruhan skor penilaian berdasarkan hasil penghitungan dua komponen tambahan yaitu fakta korupsi dan pelaksanaan SPI. Di tahun 2024, terdapat faktor koreksi pada nilai SPI KPK Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu 3,79 poin untuk pelaksanaan SPI.

Berikut adalah detail nilai SPI KPK Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2024.

Tabel 3. 22 Nilai SPI KPK Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2024

Skor Komponen Internal	Skor Komponen Eksternal	Skor Komponen Ekspert	Faktor Koreksi	
			Fakta Korupsi	Pelaksanaan SPI
76,09	91,33	75,68	0	3,79

Tabel di atas menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dan penguatan dalam implementasi SPI agar dapat mendukung upaya peningkatan integritas secara keseluruhan. Skor untuk komponen internal masih dapat ditingkatkan melalui intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye terkait upaya-upaya pencegahan korupsi kepada seluruh pemangku kepentingan di internal Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan untuk skor komponen eksper dapat ditingkatkan dengan pemilihan sampel eksper di setiap lokus survei yang bisa dijadikan sampel sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Teknik ini dikenal sebagai *targeting sampling* atau metode pengambilan sampel dengan pertimbangan target populasi yang ditetapkan. Sedangkan untuk faktor koreksi dalam pelaksanaan SPI menandakan bahwa teknis pelaksanaan survei masih dapat ditingkatkan lagi.

Untuk menanggulangnya, PIC SPI KPK telah menyusun rencana aksi berdasarkan hasil koordinasi antara KPK, unit kerja terkait, dan Inspektorat Utama. Rencana aksi tersebut lalu dimonitoring setiap triwulan untuk menilai efektivitas pelaksanaannya sehingga pada akhirnya pelaksanaan SPI di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat lebih optimal.

9. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
98.80	99	100	1. Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Polhukham; 2. Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Ekra; 3. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang .

Tabel 3. 24 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
Membuat surat ke Kemenkumham mengenai indikator penilaian	Surat pernyataan mengenai indikator penilaian ke Kemenkumham mengenai indikator kinerja	-	-	1	-	Sekretariat Jenderal DPR RI mengirimkan surat ke Kementerian Hukum mengenai indikator penilaian. Badan Legislasi telah melakukan harmonisasi sejumlah Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Alat Kelengkapan Dewan
Melakukan harmonisasi RUU	Data harmonisasi RUU	1	1	1	-	Badan Legislasi telah melakukan harmonisasi sejumlah Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Alat Kelengkapan Dewan
Menyusun TOR terkait pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	TOR pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Polhukham (FGD/ Workshop/ Seminar)	-	1	1	1	Telah dilaksanakan penyusunan 3 (tiga) ToR (FGD/Workshop/Seminar)

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
	TOR pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekra (FGD/ Workshop/ Seminar)	1	1	1	1	Telah dilaksanakan penyusunan 4 (empat) ToR (FGD/Workshop/Seminar)
Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Polhukham (FGD/ Workshop/ Seminar)	-	1	1	1	Telah terselenggaranya 3 (tiga) pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Polhukham (FGD/ Workshop/ Seminar)
	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekkuinbang Kesra (FGD/ Workshop/ Seminar)	1	1	1	1	Telah terselenggaranya 4 (empat) pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekra (FGD/ Workshop/ Seminar)
Menyusun Surat Keputusan dan Surat	Surat Keputusan pembentukan	1	-	-	-	Telah dilaksanakan disusunya Surat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
Tugas kegiatan kajian dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang	Tim Pelaksana Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi					Keputusan pembentukan tim pelaksana kegiatan kajian dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
	Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	-	Telah disusunnya 3 (tiga) Surat tugas tim penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang
Menyusun laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang	Dokumen daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi	1	1	1	1	Telah disusunnya 4 (empat) dokumen daftar undang-undang yang telah dilakukan evaluasi
	Dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang serta kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi	7	7	6	4	Telah disusunnya 24 (dua puluh empat) dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan kajian serta evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
Mengirim rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang ke AKD	Dokumen bukti dukung pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	1	Telah disusunnya 4 (empat) dokumen bukti dukung pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang
Menyusun dokumen rekap data pejabat fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang dilibatkan dalam melakukan kajian dan evaluasi undang-undang	Dokumen rekap data pejabat fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1	-	-	-	Telah disusunnya 1 (satu) dokumen rekap data pejabat fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
Melakukan pengumpulan data dukung kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, dan SOP).	Dokumen terkait kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, dan SOP)	-	1	-	-	Telah dilaksanakannya 1 (satu) pengumpulan data dukung kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, dan SOP)

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
Melaksanakan pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (dengan kegiatan <i>Benchmarking</i> , <i>Konsinyering</i>)	Laporan kegiatan <i>benchmarking</i>	1	-	-	-	Telah dilaksanakannya dan disusunnya 1 (satu) laporan kegiatan <i>benchmarking</i>
Melaksanakan pelaporan pengembangan JDIH melalui <i>e-report</i>	<i>Screenshot</i> bukti pengisian <i>e-report</i>	-	-	-	1	Membuat 1 (satu) laporan JDIH melalui <i>E-Report</i>
Membuat abstrak peraturan yang diunggah ke <i>website</i> JDIH	Dokumen terkait abstrak Peraturan yang diunggah di <i>website</i> JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI	1	1	1	1	Telah menyusun 4 (empat) abstrak Peraturan yang dapat dilihat dan diunggah di <i>Website</i> JDIH.
Mengumpulkan <i>capture</i> metadata pengolahan dokumen hukum, URL integrasi, log sinkronisasi integrasi, media sosial	<i>Screenshots</i> <i>Dashboard</i> Portal JDIH	-	-	1	-	Telah mengumpulkan 1 (satu) <i>capture</i> metadata pengolahan dokumen hukum, URL integrasi, log sinkronisasi integrasi, media sosial
Mengunggah aktivitas pengelolaan dan pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)	<i>Screenshots</i> bukti <i>upload</i> di media sosial	-	1	1	1	Telah melaksanakan 3 (tiga) pengelolaan dan pengembangan JDIH serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui media sosial JDIH (Instagram)

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
Menyusun rekapitulasi data produk hukum yang telah diunggah di JDIH	Dokumen hasil rekapitulasi data produk hukum yang telah diunggah di JDIH	-	-	-	1	Telah menyusun 1 (satu) dokumen hasil rekapitulasi data produk hukum yang telah diunggah di Website JDIH

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi IRH. Adapun variabel penilaian IRH berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020. *Pertama*, memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi. *Kedua*, mendorong regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu. *Ketiga*, mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan. *Keempat*, meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah.

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk pemenuhan rencana aksi di tahun 2024, diantaranya kegiatan harmonisasi rancangan undang-undang di Badan Legislasi, penyelenggaraan seminar dan lokakarya terkait peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, menyusun kajian dan evaluasi pemantauan dan pelaksanaan undang-undang, serta pengelolaan website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penilaian IRH tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan bukti dukung pelaksanaan IRH dalam jangka waktu Januari-Desember tahun 2023 dan mendapatkan nilai 100.00 dengan kategori AA (ISTIMEWA). Hasil penilaian ini meningkat dari realisasi di tahun 2023 dengan nilai 98.8 dengan melakukan perbaikan kelengkapan bukti dukung. Realisasi rencana aksi di tahun 2024 dilakukan sudah mencapai 100% dan dapat digunakan untuk pemenuhan bukti dukung dalam penilaian IRH tahun 2025.

10. Pelaksanaan Arsip Digital: Tingkat Digitalisasi Arsip

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Arsip Digital: Tingkat Digitalisasi Arsip

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
98,38 (AA)	98,38 (AA)	98,09 (AA)	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Tabel 3. 26 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Arsip Digital: Tingkat Digitalisasi Arsip

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pemeliharaan Kaset	Laporan Hasil Pemeliharaan Kaset dan terpeliharanya Arsip Kaset	1	-	-	-	Pemeliharaan Kaset dilaksanakan pada TW I Bulan Januari
Pemeliharaan Mini DV	Laporan Hasil Pemeliharaan MiniDV dan terpeliharanya Arsip MiniDV	1	-	-	-	Pemeliharaan Arsip MiniDV dilaksanakan pada TW I Bulan Januari
Pemeliharaan CD/DVD	Laporan Hasil Pemeliharaan CD/DVD dan terpeliharanya Arsip CD/DVD	-	1	-	-	Pemeliharaan Arsip CD/DVD dilaksanakan pada TW II Bulan Mei
Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i>	Laporan Hasil Pemeliharaan <i>Mobile File</i> dan terpeliharanya <i>Mobile File</i>	-	-	1	-	Pemeliharaan <i>Mobile File</i> dilaksanakan pada TW III Bulan Juli
Pemeliharaan Mesin Cacah	Laporan Hasil Pemeliharaan Mesin Cacah dan terpeliharanya Mesin Cacah	-	1	-	-	Pemeliharaan Mesin Cacah dilaksanakan pada TW II Bulan Juni
Pemeliharaan Mesin Potong	Laporan Hasil Pemeliharaan Mesin	-	-	1	-	Pemeliharaan Mesin Potong dilaksanakan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Potong dan terpeliharanya Mesin Potong					pada TW III Bulan September
Pemeliharaan Lemari Kaset	Laporan Hasil Pemeliharaan Lemari Kaset dan terpeliharanya Lemari Kaset	-	1	-	-	Pemeliharaan Lemari Kaset dilaksanakan pada TW II Bulan April
Sewa Ruang Penyimpanan Boks Arsip Satu	Surat Perjanjian Kontrak Sewa	1	1	1	1	Perjanjian Sewa Ruang Penyimpanan Boks Arsip Satu telah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur
Sewa Ruang Penyimpanan Boks Arsip Dua	Surat Perjanjian Kontrak Sewa	1	1	1	1	Perjanjian Sewa Ruang Penyimpanan Boks Arsip Dua telah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur
Peningkatan Kapasitas SDM	Sertifikat/Surat Tugas	3	1	2	1	7 (tujuh) kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM telah dilaksanakan dengan baik
Penataan Arsip Persidangan	Laporan Hasil Penataan Arsip dan Tertatanya Arsip Persidangan	1	-	-	-	Penataan Arsip Persidangan telah dilaksanakan pada TW I bulan Maret
Penataan Arsip Bidang Administrasi	Laporan Hasil Penataan Arsip dan Tertatanya Administrasi	1	-	-	-	Penataan Arsip Administrasi telah dilaksanakan pada TW I bulan Februari
Penataan Arsip Keuangan	Laporan Hasil Penataan Arsip dan Keuangan	1	-	-	-	Penataan Arsip Keuangan telah

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Tertatanya Arsip Keuangan					dilaksanakan pada TW I bulan Januari
Penataan Arsip Bidang Kepegawaian	Laporan Hasil Penataan Arsip Bidang Kepegawaian dan Tertatanya Arsip Kepegawaian	-	-	1	-	Penataan Arsip Bidang Kepegawaian telah dilaksanakan pada TW III bulan Juli - September
Penataan Arsip Barang/Jasa	Laporan Hasil Penataan Arsip Barang/Jasa dan Tertatanya Arsip Barang/Jasa	1	-	-	-	Penataan Arsip Barang/Jasa telah dilaksanakan pada TW I bulan Maret

Indeks Digitalisasi Arsip merupakan salah satu komponen dalam penilaian Pengawasan Kearsipan Eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Lembaga Negara yang memiliki Unit Kearsipan dinilai pengelolaan arsipnya oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam proses penilaian indeks digitalisasi arsip, ruang lingkup yang dinilai oleh ANRI adalah pengelolaan arsip digital/elektronik. Mengingat arsip yang dihasilkan oleh DPR RI adalah arsip konvensional (kertas) dan arsip rekaman suara, maka diperlukan proses yang dinamakan alih media arsip.

Untuk melakukan alih media, Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Bagian Arsip telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan adanya Peraturan tersebut proses alih media arsip akan menghasilkan arsip - arsip elektronik/digital yang sesuai dengan standar pengolahan arsip elektronik.

Dalam indeks digitalisasi arsip, ada beberapa komponen pendukung yang harus disediakan agar pengolahan arsip elektronik/digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengolahan arsip. Dalam hal ini, Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan telah menjalankan pengolahan arsip elektronik/digital berdasarkan peraturan terkait. Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai Digitalisasi Arsip sebesar 98,09 dengan predikat "Sangat Memuaskan (AA)" dalam pengolahan arsip elektronik/digital (PAE) oleh ANRI dan mendapat peringkat pertama Nasional dalam kategori Lembaga Negara.

Namun, perolehan nilai tersebut mengalami penurunan 0,29 poin dari tahun 2023 yang memperoleh nilai 98,38. Penurunan nilai ini disebabkan oleh kurang efektifnya pengolahan arsip elektronik di unit kerja Eselon II terutama dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Hal ini dikarenakan aplikasi SRIKANDI yang masih tidak stabil dan terus mengalami perubahan dan perbaikan dari Tim *Developer* SRIKANDI - ANRI. Permasalahan dan kendala lain yang dapat mempengaruhi indeks digitalisasi arsip adalah kurangnya dukungan anggaran untuk alih media arsip serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan arsip elektronik/digital.

11. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Indeks Pembangunan Statistik

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Indeks Pembangunan Statistik

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
1.51	2.6	2,57	Pusat Teknologi Informasi

Tabel 3. 28 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Indeks Pembangunan Statistik

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Menyelaraskan data dengan Standar Data Statistik dan Data Induk/Kode Referensi	Data statistik sektoral yang dinilai telah sesuai dengan Standar Data Statistik Nasional dan Data Induk/Kode Referensi	-	2	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Definisi variabel pada deskripsi setiap data telah diselaraskan dengan Standar Data Statistik Nasional (SDSN) yang dapat dilihat pada Portal Satu Data DPR (data.dpr.go.id); Diterapkannya penggunaan Data Induk/Kode Referensi berupa Kode Wilayah pada dua kegiatan statistik yaitu Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat ke DPR

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						dan Kompilasi Data Profil Anggota DPR
Melakukan dokumentasi setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	Terdokumentasinya setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	-	2	-	-	Dokumentasi setiap tahapan pada dua kegiatan statistik yang dinilai telah terpenuhi yang dijadikan dasar dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor
Penyusunan prosedur pengelolaan data statistik sektoral	Disahkannya prosedur pengelolaan data statistik sektoral	-	1	-	-	Telah disusun dan disahkan 4 (empat) SOP sebagai prosedur teknis, sebagai turunan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 20 Tahun 2022 tentang Satu Data DPR RI <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perencanaan Satu Data DPR; 2. SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Diseminasi Satu Data DPR; 3. SOP Pemeriksaan dan Penyebarluasan Satu Data DPR; 4. SOP Penjaminan Kualitas Satu Data DPR.
Melakukan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral	Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM dalam bidang statistik sektoral	1	-	-	-	Unit kerja Walidata dan perwakilan produsen data telah mengikuti kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	yang diselenggarakan BPS					bersama Direktorat SP2K BPS selaku Instansi Pembina pada tanggal 22-23 Februari 2024
Bimbingan teknis penggunaan Portal Satu Data DPR	Terlaksananya bimbingan teknis dengan Produsen Data dalam penggunaan Portal Satu Data DPR	-	1	-	-	Telah dilakukan Bimbingan Teknis Portal Satu Data DPR RI kepada unit kerja produsen data pada tanggal 22-24 April 2024
Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS	Setiap kegiatan statistik sektoral yang dinilai telah dilaporkan ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi	1	1	-	-	Telah mendapat surat rekomendasi dari BPS untuk kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada tahun 2024. Kedua kegiatan telah dilakukan pengajuan rekomendasi ke BPS melalui aplikasi ROMANTIK yang menghasilkan surat rekomendasi dengan nomor V-24.0000.015 dan K-24.0000.026

Dalam rencana aksi menyelaraskan data dengan Standar Data Statistik dan Data Induk/Kode Referensi, telah dilakukan penerapan Data Induk/Kode Referensi pada *database* Pengaduan Masyarakat dan Daftar Anggota DPR RI yaitu penggunaan Kode Wilayah Provinsi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia. Penerapan Standar Data Statistik telah dilakukan untuk menyelaraskan model penyajian data yang digunakan sehingga dapat dengan mudah dibagi pakaikan. Penerapan Standar Data Statistik tertuang pada Buku Arsitektur Data Sekretariat Jenderal DPR RI yang didalamnya menggunakan konsep variabel data sesuai dengan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh BPS.

Kemudian pada rencana aksi melakukan dokumentasi setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data, telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Penilai Internal EPSS DPR RI pada tanggal 21 Februari 2024. Dalam pembahasan rapat tersebut

telah dilakukan identifikasi dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam pemenuhan dokumentasi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran data. Saat ini dokumentasi yang diperlukan pada setiap tahapan telah tersedia dan digunakan sebagai eviden penilaian.

Selanjutnya pada rencana aksi penyusunan prosedur pengelolaan data statistik sektoral, telah dibuat prosedur tata kelola Satu Data DPR yang merupakan turunan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 20 Tahun 2022 tentang Satu Data DPR. Prosedur yang telah dibuat merepresentasikan tahapan-tahapan pelaksanaan Satu Data DPR dengan rincian sebagai berikut:

1. SOP Perencanaan Satu Data DPR;
2. SOP Pengumpulan, Pengelolaan, dan Diseminasi Satu Data DPR;
3. SOP Pemeriksaan dan Penyebarluasan Satu Data DPR;
4. SOP Penjaminan Kualitas Satu Data DPR.

Pada rencana aksi melakukan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral, telah dilakukan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistika pada tanggal 22 – 24 Februari 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota Tim Penilai Internal EPSS Sekretariat Jenderal DPR RI yang anggotanya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 394/SEKJEN/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal EPSS Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, telah diselenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Data Protection Officer (DPO) pada tanggal 4 – 8 Maret 2024 yang merupakan penerapan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang manajemen data, dalam hal ini sekaligus sebagai tahapan penerapan UU Perlindungan Data Pribadi.

Bimbingan teknis penggunaan Portal Satu Data DPR juga telah diselenggarakan pada tanggal 22 – 24 Maret 2024 yang diikuti oleh Pustekinfo sebagai Walidata dan perwakilan Produsen Data sebagai *piloting* yaitu Bagian Pengaduan Masyarakat, Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, Sekretariat Badan Legislasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum. Dalam kegiatan tersebut masing-masing perwakilan produsen data melakukan uji coba penggunaan Portal Satu Data DPR mulai dari pengajuan data prioritas sampai dengan data berhasil dipublikasi.



Gambar 3. 15 Foto Kegiatan Pelatihan Penggunaan Portal Satu Data DPR RI

Terakhir, pada rencana aksi mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS, telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Produsen Data dengan BPS pada tanggal 2 Februari 2024 membahas terkait evaluasi pelaksanaan EPSS yang disimpulkan dua data yang akan diajukan untuk penilaian adalah Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat ke DPR RI Tahun 2023 dan Kompilasi Data Daftar Anggota DPR RI Tahun 2023. Telah dilakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS melalui aplikasi ROMANTIK serta telah diterbitkan rekomendasi terhadap dua kegiatan statistik yang dinilai.

12. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
47,18	72	75,5	Biro Umum

Tabel 3. 30 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Membuat Surat Edaran kepada para PPK untuk melakukan Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada aplikasi SPSE	Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1484/TL.04/1/2024	1	-	-	-	Surat Edaran sudah di umumkan di portal.dpr.go.id di bulan Januari 2024, sehingga PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan pemantauan dan monitoring setiap Triwulan untuk peningkatan ITKP DPR RI
Pendampingan penginputan RUP Tahun 2024	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Pendampingan ke PPK dan Staf PPK dalam penginputan RUP di bulan Januari 2024 sesuai jadwal sekaligus memonitoring kegiatan pengadaan barang/jasa dari setiap PPK Satker Setjen dan PPK Satker Dewan.
Pendampingan penginputan RUP Tahun 2024 dan Penyelesaian Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Dengan mengundang narasumber dari LKPP dilakukan kegiatan pendampingan dan penyelesaian

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
dan Jasa Tahun 2023 pada aplikasi SPSE 4.5.						pencatatan realisasi terkait tata cara penyelenggaraan katalog elektronik sektoral DPR RI agar pengadaan barang/jasa dilakukan secara efektif, transparansi dan efisien
Koordinasi Penginputan RUP di Lingkungan Biro Umum	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Meminimalkan risiko kesalahan penginputan RUP di Satker Biro Umum serta bersinergi dengan bagian di Lingkup Biro Umum
Koordinasi Persiapan Evaluasi Penggunaan PDN dan UMK-Kop	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Berkoordinasi dengan Inspektorat Utama untuk membentuk Tim yang bertugas melaksanakan strategi peningkatan penggunaan PDN, Pemberdayaan UMKK dan monitoring terhadap aplikasi penggunaan PDN di DPR RI
Konsultasi dengan LKPP tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Menambah wawasan terkait E-Katalog Sektoral kepada seluruh PPK dengan dihadiri

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Katalog Elektronik Sektoral						narasumber dari LKPP guna transisi E-Katalog Versi 5.0 ke Versi 6.0 yang akan dimulai di Tahun 2025
Evaluasi Penginputan RUP dan Persiapan Pelaksanaan Penginputan RUP TA 2024 ke Aplikasi SIRUP	Pointer, Rekapitulasi Progress RUP Satker Setjen dan Satker Dewan	1	-	-	-	Penyampaian laporan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa DPR RI dari Kepala Biro Umum ke Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan arahan, saran serta solusi guna meningkatkan nilai skor ITKP Tahun 2024
Konsultasi dengan LKPP tentang Pemilihan Penyedia	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Menambah wawasan terkait tata cara pemilihan penyedia untuk setiap kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung
Koordinasi persiapan Pengumuman Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 bersama dengan Deputi Administrasi	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran terkait RUP tahun 2024 yang di <i>input</i> di aplikasi SiRUP agar seluruh PPK dapat

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
dan Deputi Persidangan serta Pejabat Tinggi Pratama						menyelesaikan penginputan RUP paling lambat di tanggal 23 Februari 2024 guna menaikkan skor ITKP perihal Non E-Tendering/Non E-Purchasing dapat bertambah poin
Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan <i>Parliamentary Meeting on The Occasion Of the 10th World Water Forum</i>	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Memenuhi undangan dari BKSAP untuk pendampingan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara E-Purchasing serta tata cara penginputan RUP di aplikasi SiRUP
Finalisasi Penginputan RUP dengan Para PPK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Monitoring terhadap rekapitulasi pagu anggaran dan realisasi pencatatan anggaran untuk mempercepat target penilaian ITKP kepada sejumlah mitra (<i>stakeholder</i>) sebelum paket belanja bahan diumumkan di aplikasi SiRUP

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Finalisasi penginputan RUP Tahun 2024 tanggal 6-7 Maret 2024 dengan mengundang para PPK dan PP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta Deputi Bidang Administrasi dan Narasumber dari LKPP	Undangan Rapat, Rekapitulasi Progress RUP, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Menyampaikan laporan Paket Belanja Bahan Triwulan I serta melakukan Finalisasi kepada PPK yang belum 100% dalam penginputan RUP didampingi langsung oleh narasumber dari LKPP dan Tim PBJ serta diawasi langsung oleh Deputi Administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran DPR RI
Membuat Surat Klarifikasi atas Pagu Pengadaan yang harus diumumkan pada aplikasi SIRUP kepada LKPP	Surat Klarifikasi	1	-	-	-	Berkirim surat ke LKPP terkait klarifikasi biaya perjalanan dinas yang tidak dikategorikan dalam belanja bahan yang harus diumumkan di aplikasi SiRUP
FGD dengan para PPK dan PP dan mengundang Narasumber LKPP sehingga terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui Katalog Sektoral	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Menambah wawasan serta tata cara penelaahan dan serta pembuatan etalase E-Katalog Sektoral DPR RI di tanggal 20-21 Februari 2024

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pendampingan Pengisian E-Kontrak, E-Purchasing, E-Tendering, dan Non E-Tendering / Non E-Purchasing untuk Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 pada bulan Januari 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Pendampingan ke seluruh PPK untuk memastikan penginputan data paket belanja bahan di aplikasi SiRUP telah sesuai dengan ketentuan guna meningkatkan ITKP DPR RI
Monitoring Proses Metode E-Purchasing sampai dengan tahapan selesai	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Melakukan monitoring dan pendampingan kepada PPK agar dalam proses pengadaan barang/jasa dengan metode E-Purchasing sesuai dengan ketentuan.
Pendampingan Teknis E-Purchasing kepada para PPK	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Telah dilakukannya Sosialisasi dan pendampingan teknis E-Purchasing serta kepada PPK didampingi oleh narasumber dari LKPP
Pendampingan Teknis Tata Cara Perhitungan PDN dan TKDN dalam Praktik Pengadaan Barang/Jasa	Surat Tugas, <i>Pointer</i> , dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Telah dilakukannya Sosialisasi dan pendampingan penerapan penghitungan PDN dan TKDN kepada PPK didampingi oleh narasumber dari LKPP

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pendampingan untuk para PPK dan PP agar melakukan Pencatatan pada Aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode <i>Tender</i> dan <i>Purchasing</i>	Undangan FGD, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Melakukan monitoring dan pendampingan kepada PPK agar dalam proses pengadaan barang/jasa dengan metode E-Tendering dan E-Purchasing di aplikasi SPSE 4.5.
Monitoring pencatatan pada aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode <i>Tender</i> dan <i>Purchasing</i> dan menginfokan para PPK dan PP untuk menyelesaikan proses pencatatannya	Undangan, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Melakukan monitoring dan pendampingan kepada PPK agar dalam proses pengadaan barang/jasa dengan metode E-Purchasing agar belanja bahan produk elektronik sesuai dengan dokumen hasil telaah produk katalog
Pelaksanaan <i>Tender</i> dari unit-unit kerja yang didampingi oleh JF PBJ dilakukan sampai dengan proses <i>Tender</i> selesai	<i>Screenshot</i> daftar paket pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dari web lpse.dpr.ri	1	-	-	-	Memonitoring paket pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dengan eviden <i>screenshot</i> daftar paket pekerjaan dari aplikasi SPSE 4.5.
Mengingatn kepada para PPK agar ada minimal 1 (satu) kegiatan	Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Melakukan monitoring dan pendampingan kepada PPK agar

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
pengadaan yang dilakukan dengan metode pembelian melalui katalog Bela Negara/Toko Daring						dalam proses pengadaan barang/jasa dari katalog Bela Negara/Toko Daring dengan metode E-Purchasing sesuai dengan ketentuan
Pendampingan kepada para PPK dan PP melakukan proses <i>Tender</i> dilanjutkan dengan penyelesaiannya pada aplikasi E-Kontrak	Laporan singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Pendampingan kepada para PPK dan PP terkait tata cara pemilihan penyedia dengan metode <i>Tender</i> dilanjutkan dengan penyelesaian E-Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sampai dengan selesai
Pendampingan kepada para PPK untuk penyelesaian E-Kontrak sampai dengan selesai	Undangan Narasumber dan Paparan Materi	1	-	-	-	Menambah wawasan serta tata cara penyelesaian paket kegiatan yang dilakukan dengan metode E-Tender penyelesaian E-Kontrak kepada seluruh PPK dan PP
Penelaahan Etalase Percetakan Produk	Nota Dinas dan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Telah dilakukan penelaahan Etalase katalog sektoral

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Elektronik Penerbitan						percetakan produk elektronik penerbitan dan produk pencetakan DPR RI
Penelaahan Etalase Produk Elektronik Penerbitan Penelaahan Etalase Produk Sarana Umum YANKES	Nota Dinas dan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Melakukan pendampingan dan penelaahan kepada PPK Bidang Pemberitaan Parlemen dan PPK Bidang Umum agar belanja bahan produk elektronik sesuai dengan dokumen penetapan hasil telaah produk katalog elektronik etalase produk sarana penunjang umum dan perlengkapan rumah tangga DPR RI
Monitoring dan Evaluasi RUP sesuai Revisi Anggaran dan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat dan foto kegiatan	-	1	-	-	Melakukan monitoring untuk optimalisasi dan mengevaluasi RUP sesuai dengan revisi anggaran dan Pencatatan Non E-Tendering/ Non E- Purchasing seluruh PPK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Telah dilakukan pendampingan pencatatan realisasi anggaran tahun 2024 ke PPK agar meminimalisasi kesalahan penginputan RUP Tahun Anggaran 2024
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas undangan Biro Persidangan I	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan.=	-	1	-	-	Memenuhi undangan dari Biro Persidangan I untuk pendampingan dalam kegiatan penginputan RUP serta pengisian realisasi anggaran di aplikasi SiRUP
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas Undangan Biro Kesekretariatan Pimpinan	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Memenuhi undangan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan dan melakukan pendampingan dalam kegiatan penginputan RUP serta pengisian realisasi anggaran di aplikasi SiRUP
FGD Tindak Lanjut Pemenuhan JF	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Telah melakukan koordinasi dengan Biro SDMA untuk mengupayakan terpenuhinya jumlah JF PBJ sesuai dengan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						rekomendasi LKPP dan Kementerian PANRB
FGD strategi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dan Pendampingan Pengisian Si-Renaksi LKPP dengan mengundang narasumber dari LKPP	Undangan, Nota Dinas, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Melakukan rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi, Bagian Pola Karir ASN dan Biro SDMA untuk pemenuhan JF PBJ yang telah direkam pada aplikasi SIRENAKSI LKPP serta memproses pengusulan perpindahan dari Jabatan lain menjadi JF PBJ ke LKPP
Membuat Surat perihal usulan pengangkatan JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain	Surat Keterangan B/178/KP.05.01/02/2024 tanggal 13 Februari 2024	1	-	-	-	Berkirim surat ke LKPP terkait usulan 4 (empat) PNS DPR RI untuk mengisi proses pengangkatan JF PBJ melalui proses perpindahan dari jabatan lain
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	Surat Tugas dan Sertifikat	1	-	-	-	Telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelatihan dan sertifikasi kompetensi pelaksanaan dasar pengadaan barang/jasa

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						terhadap 10 (sepuluh) PNS Bagian PBJ yang diselenggarakan oleh Pusbangkom SDM Legislatif
Koordinasi dalam rangka Pemenuhan JF	Undangan, Nota Dinas, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Biro SDMA untuk pemenuhan JF PBJ dalam rangka meningkatkan nilai ITKP untuk hasil maksimum dari indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ
FGD dalam rangka tindak lanjut pemenuhan kebutuhan JF dan Pengelolaan SDM	Undangan, Nota Dinas, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Telah dilakukan pembahasan dengan Bagian Pengelolaan SDM terkait dengan pemenuhan kebutuhan JF
Percepatan Penerapan 17 Standard LPSE	Undangan dan Materi Bimbingan Teknis	-	1	-	-	Telah dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis untuk percepatan penerapan 17 Standard LPSE
Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemenuhan JF	Nota Dinas	-	1	-	-	Telah dilakukan Rencana Aksi Pemenuhan JF melalui aplikasi LKPP untuk pemenuhan JF

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Non E-Purchasing Triwulan II	Undangan Monitoring dan Evaluasi, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Telah dilakukan monitoring dan Evaluasi Pencatatan Non E-Purchasing Triwulan II
Rapat Koordinasi Internal terkait pembahasan Strategi Aplikasi SIRUP, E-Tendering dan E-Purchasing	Foto Kegiatan dan Laporan Singkat	-	-	1	-	Telah dilakukan Rapat Koordinasi Internal yang dipimpin oleh kepala Biro Umum terkait pembahasan Strategi Aplikasi SIRUP, E-Tendering dan E-Purchasing
Rapat Koordinasi Paket Pengadaan Belanja Bahan yang akan diumumkan di Aplikasi SIRUP Tahun Anggaran 2024	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instansi membahas terkait Paket Pengadaan Belanja Bahan yang akan diumumkan di Aplikasi SIRUP Tahun Anggaran 2024
Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi SPSE	Undangan dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis kepada para PPK dan staf PPK tentang Penerapan Aplikasi SPSE di Hotel Santika

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Knowledge Sharing Aplikasi Monitoring Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tangerang	Nota Dinas, Kerangka Acuan Kegiatan, Surat Tugas, dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Telah terlaksana Knowledge Sharing Aplikasi Monitoring Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tangerang
Bimbingan Teknis Strategi Pelaksanaan E-Katalog dan E-Purchasing pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sertifikat dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Strategi Pelaksanaan E-Katalog dan E-Purchasing pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Metode E-Purchasing dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan mengundang Narasumber dari LKPP, mengundang Narasumber dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Para Auditor, PPK dan Pejabat Pengadaan di	Undangan rapat dan foto kegiatan	-	-	1	-	Telah dilaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Metode E-Purchasing dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan mengundang Narasumber dari LKPP, mengundang Narasumber dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Para Auditor, PPK dan Pejabat Pengadaan di

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Ruang Rapat Abdul Muis						Ruang Rapat Abdul Muis
Rapat persiapan PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen DPR RI untuk Rapat Koordinasi dengan KPA	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Para PPK Satker Dewan dan Para PPK Satker Setjen yang menghadiri kegiatan didampingi oleh Tim Teknis yang berkaitan dengan penginputan di aplikasi SiRUP berjumlah 70% dari total PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen
Rapat dengan PPK Bidang Protokol Humas dan PPK Bidang SDM Aparatur dengan mengundang Narasumber dari LKPP terkait Transisi E-Katalog dari Versi 5.0 ke versi 6.0.	Undangan Rapat, Undangan Narasumber, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	PPK Bidang Protokol Humas dan PPK Bidang SDM Aparatur menghadiri kegiatan terkait pengadaan barang/jasa di Bagian tersebut, khususnya pengadaan dengan metode E-Katalog
FGD dengan para PPK dan PP dan mengundang narasumber LKPP terkait Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Layanan Keprotokolan Bandara	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	PPK dan PP Bidang Protokol menghadiri kegiatan didampingi Kepala Bagian Protokol serta narasumber dari LKPP untuk pemilihan penyedia pengadaan jasa

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Keprotokolan Bandara
Rapat dengan PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen DPR RI dengan mengundang narasumber dari LKPP terkait Penyusunan Kertas Kerja RUP Tahun 2025	Undangan Rapat, Undangan Narasumber, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Para PPK Satker Dewan dan Para PPK Satker Setjen yang menghadiri kegiatan didampingi oleh Tim Teknis yang berkaitan dengan penginputan di aplikasi SiRUP berjumlah 70% dari total PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen.
Rapat dengan PPK Bidang Umum dan Tim Teknis Pencatatan RUP pada aplikasi SPSE 4.5 lingkup Satker Biro Umum.	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	PPK Bidang Umum beserta Tim Teknis dari Bagian yang ada di Satuan Kerja Biro Umum mengikuti kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing sampai dengan Triwulan III	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Melanjutkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing dari Triwulan II ke Triwulan III agar didapat hasil realisasi antara pagu anggaran dengan pencatatan pekerjaan setiap Bidang PPK

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024	Surat Tugas dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Penyampaian laporan kegiatan yang berkaitan dengan RUP Tahun Anggaran 2024 dari setiap PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran
Penginputan RUP Tahun 2025 pada aplikasi SIRUP	Undangan Narasumber, Undangan Peserta, dan Surat Tugas	-	-	-	1	Telah melaksanakan pendampingan kepada Para PPK dan Tim Teknis dengan mengundang narasumber dari LKPP terkait penginputan data Pengadaan Barang/Jasa di Aplikasi SIRUP dan SPSE 4.5.
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Tahun 2024	Undangan Narasumber dan Undangan Peserta	-	-	-	1	Telah Melaksanakan pendampingan kepada Para PPK dan Tim Teknis dengan mengundang narasumber dari LKPP terkait penginputan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Non E-Purchasing dan Non E-Tendering di

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Aplikasi SIRUP dan SPSE 4.5.
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyesuaian Rekomendasi Kebutuhan JF PBJ ke Kementerian PANRB	Undangan Rapat, Bahan Rapat, dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Telah dilakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyesuaian Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ ke Kementerian PANRB
Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PBJ)	Surat Rekomendasi dari LKPP	-	-	1	-	Mendapatkan surat Rekomendasi dari LKPP Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) menjadi sebanyak 15 (lima belas) orang JF PPBJ
Rapat Secara Virtual dengan Narasumber LKPP, Kepala Biro SDM Aparatur dan Para Calon Pejabat Fungsional untuk membahas Tata Cara Uji Kompetensi JF PBJ	Undangan Rapat, Notulen Rapat, dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Telah dilaksanakan Rapat Secara Virtual dengan Narasumber LKPP, Kepala Biro SDM Aparatur dan Para Calon Pejabat Fungsional untuk membahas Tata Cara Uji Kompetensi JF PPBJ
Pemberitahuan Tentang Nilai ITKP Sementara untuk	Surat Edaran LKPP Nomor 27791/D.3.1/10/2024	-	-	-	1	Mendapatkan Surat Edaran dari LKPP perihal

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ						Pemberitahuan Tentang Nilai ITKP Sementara untuk Indikator Kualifikasi dan Kompetensi
Pemberitahuan tentang Percepatan Pengelolaan SDM PBJ untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan dan PPK	Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: B/331/TI.04/10/2 024	-	-	-	1	Surat Edaran sudah diumumkan di portal.dpr.go.id di bulan Oktober 2024 perihal penunjukan 7 (tujuh) PNS sebagai PPK atau PP
<i>Knowledge Sharing</i> tentang Peningkatan Maturitas UKPBJ di Kabupaten Pandeglang	Nota Dinas, Kerangka Acuan Kegiatan, Surat Tugas, dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Telah dilaksanakan <i>Knowledge Sharing</i> untuk wawasan tata cara meningkatkan maturitas UKPBJ DPR RI bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemberitahuan Tentang Nilai ITKP Sementara untuk Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Surat Edaran LKPP Nomor 27791/D.3.1/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024	-	-	-	1	Mendapatkan Surat Edaran dari LKPP perihal Pemberitahuan Tentang Nilai ITKP Sementara untuk Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

Besaran nilai ITKP dihitung dari 3 (tiga) Indikator yang terdiri dari Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan skor nilai 30, Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dengan skor nilai 30 dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan skor nilai 40.

Target nilai ITKP untuk tahun 2024 adalah sebesar 72,7, dengan perincian target sebagai berikut : Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan memperoleh skor 21 (SIRUP 9, e-purchasing 2; non e-tendering/non e-purchasing 2; e-tendering 5; toko daring 1; dan e-kontrak 2), Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ memperoleh skor 11,7 dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ memperoleh skor 40.

Realisasi nilai ITKP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 mencapai skor sebesar 75,52, dengan perincian : Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan memperoleh skor 23,50 (SIRUP 10, e-tendering 5, e-purchasing 4, e-kontrak 4,50), Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, setelah disetujuinya usul klarifikasi jumlah JF PBJ menjadi 15 (lima belas) orang, dan jumlah JF yang ada saat ini sebanyak 6 (enam) orang memperoleh skor 12, dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ memperoleh skor 40.

Untuk Indikator Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ telah mencapai skor sebesar 10. Nilai Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ diukur berdasarkan keterisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di K/L dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ yang telah ditetapkan oleh LKPP. Sampai dengan akhir tahun 2024, Formasi JF PPBJ yang dimiliki oleh Bagian PBJ baru terpenuhi atau eksisting sebanyak 6 (enam) orang. Setelah mendapatkan persetujuan terhadap klarifikasi jumlah formasi JF PPBJ yang telah ditetapkan oleh LKPP menjadi sebanyak 15 (lima belas) JF PPBJ, maka mendapatkan skor 12.

Indikator Kematangan UKPBJ telah mencapai skor maksimal sebesar 40%, maka tingkat kematangan (maturitas) UKPBJ Sekretariat Jenderal DPR RI berada pada Level 3 Proaktif sesuai dengan amanat dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024, dilakukan dengan menggunakan data tahun 2023, sedangkan untuk penilaian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan menggunakan data tahun 2023 dan 2024.



Gambar 3. 16 Hasil Final Indeks Tata Kelola Pengadaan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

13. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:

a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
94,26	96	96,64	Biro Keuangan

Tabel 3. 32 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penyediaan Aplikasi Monitoring IKPA	Pembangunan Aplikasi DigitAll melalui fitur IKPA dan Fitur Rencana Penarikan Dana	1	-	-	-	Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengembangan fitur IKPA dan RPD di aplikasi DigitAll
	Terbitnya Instruksi Sekretaris Jenderal terkait Perjanjian Kinerja Capaian Nilai IKPA	1	-	-	-	Pada Tahun 2024 telah dilakukan penerbitan Instruksi Sekretaris Jenderal No. 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini
	Terlaksananya sosialisasi dan bimtek Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Pada Tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis monitoring nilai IKPA
	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Pada tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis monitoring Deviasi Halaman III DIPA
	Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan	-	1	-	1	Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemberian penghargaan bagi unit kerja dengan capaian IKPA tertinggi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Buku Saku terkait Tata Cara Panduan Monitoring Nilai IKPA dan Rencana Kegiatan	2	-	-	-	Pada Tahun 2024 telah pembuatan buku saku terkait tata cara panduan monitoring nilai IKPA dan RPD

Penyediaan Aplikasi Monitoring IKPA

Pada Tahun 2024, Biro Keuangan melakukan rencana aksi penyediaan aplikasi monitoring IKPA. Aplikasi Monitoring IKPA digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi bagaimana anggaran yang telah dialokasikan digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Adapun indikator *output* dalam Aplikasi Monitoring IKPA yaitu:

- Pembangunan Aplikasi DigitAll melalui fitur IKPA dan Fitur Rencana Penarikan Dana
Biro Keuangan membangun aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang telah digunakan sesuai dengan yang direncanakan melalui modul IKPA dan merencanakan dan memantau penarikan dana secara efektif melalui modul Rencana Penarikan Dana.
- Terbitnya Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI terkait Perjanjian Kinerja Capaian Nilai IKPA
Pembuatan regulasi sebagai dasar perjanjian kinerja melalui penerbitan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini.
- Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll
Sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan Biro Keuangan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dalam unit kerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.
- Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll

Sosialisasi ini sebagai bentuk pengarahan Biro Keuangan dalam mengukur perbedaan atau penyimpangan antara anggaran yang direncanakan dalam dokumen DIPA dan pelaksanaan anggaran yang sebenarnya. Halaman III DIPA umumnya mencakup rincian anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja tertentu.

- Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan

Sebagai strategi Biro Keuangan untuk mendorong unit kerja agar lebih berkomitmen dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja dengan meningkatkan kompetisi sehat, meningkatkan akuntabilitas, mengapresiasi kinerja positif dan mendorong perbaikan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

- Buku Saku terkait Tata Cara Panduan Monitoring Nilai IKPA dan Rencana Kegiatan

Buku saku diterbitkan untuk memberikan panduan yang jelas kepada unit kerja dan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di unit kerja. Buku saku ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai dengan anggaran negara dapat dipantau dengan baik dan dievaluasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
3,4	3,7	3,75	Biro Keuangan

Tabel 3. 34 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK LKPP	Jumlah laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK LKPP	1	1	1	1	Pada tahun 2024, seluruh temuan BPK LKPP TA 2023 yang berhubungan dengan BMN telah seluruhnya ditindaklanjuti

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Monitoring realisasi PNBPN khususnya yang berasal dari Pengelolaan BMN	Jumlah laporan monitoring capaian PNBPN pengelolaan BMN	3	3	3	3	Capaian realisasi PNBPN yang berasal dari Pengelolaan BMN pada Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan
Melakukan monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN sudah terinput ke dalam Aplikasi SIMAN modul pengawasan dan pengendalian	Jumlah laporan monitoring tindak lanjut pengelolaan BMN	1	1	1	1	Persetujuan yang dikeluarkan oleh Pengelola/Pengguna Barang terkait pengelolaan BMN telah seluruhnya ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa, proses lelang dan pengajuan penetapan status penggunaan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melakukan pengajuan usulan penghapusan secara berkala	Jumlah laporan penghapusan per semester	-	1	-	1	Biro Keuangan telah melaksanakan penghapusan secara berkala yang tercantum dalam laporan penghapusan persemester sehingga seluruh penghapusan dapat terlaksana tepat waktu dan menghindari penumpukan barang di Gudang
Melakukan monitoring terhadap sisa BMN yang belum dilakukan PSP	Jumlah Laporan PSP Tanah dan/atau Gedung Bangunan	-	1	-	1	Pelaksanaan kegiatan Penetapan Status Penggunaan khususnya untuk BMN yang berupa Tanah serta Gedung dan Bangunan telah dimaksimalkan

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) menjadi alat ukur penting dalam menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di berbagai Kementerian dan Lembaga. Pengelola Barang telah menetapkan bobot dan formula indikator kinerja pengelolaan BMN atau IPA tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024. Meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan perhitungan tetapi di tahun 2024, DPR RI masih dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan IKU.

Penjabaran rencana aksi yang telah dilaksanakan serta faktor pendorong keberhasilannya sebagai berikut :

Pada rencana aksi monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK LKPP, seluruh temuan yang diidentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah sepenuhnya ditindaklanjuti. Hal ini

mencerminkan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara menyeluruh, termasuk memperbaiki pengelolaan aset negara, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa pengelolaan BMN dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini juga bertujuan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan mendatang.

Selanjutnya, terkait monitoring realisasi PNBPN khususnya yang berasal dari Pengelolaan BMN, capaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan ini dicapai berkat terjalinnya kerjasama yang solid antara Biro Keuangan dan unit kerja pengelola PNBPN, khususnya Bagian Pengelolaan Wisma, serta dukungan dari Kementerian Keuangan. Sinergi yang baik ini memungkinkan optimalisasi pengelolaan aset negara, sehingga menghasilkan penerimaan yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar instansi dalam mencapai tujuan keuangan negara secara efektif.

Kemudian untuk rencana aksi monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan serta tindak lanjut pengelolaan BMN juga telah sepenuhnya ditindaklanjuti melalui berbagai langkah strategis, termasuk perjanjian sewa, proses lelang, dan pengajuan penetapan status penggunaan. Setelah persetujuan diberikan, tim pengelola segera melakukan penyusunan perjanjian sewa yang jelas dan terperinci, memastikan bahwa semua ketentuan dan syarat yang disepakati dapat dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, proses lelang dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk menjamin keadilan dan keterbukaan dalam pemilihan penyewa atau pengguna aset.

Di samping itu, pengajuan penetapan status penggunaan juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap BMN dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan BMN tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan aset negara. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola BMN dengan baik demi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah.

Pada rencana aksi pengajuan usulan penghapusan secara berkala, Biro Keuangan telah melaksanakan proses penghapusan aset secara berkala yang tercantum dalam laporan penghapusan setiap semester. Dengan melakukan penghapusan secara teratur, Biro Keuangan memastikan bahwa seluruh penghapusan dapat terlaksana tepat waktu. Hal ini sangat penting untuk menghindari penumpukan barang di gudang, yang dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan aset. Selain itu, penghapusan yang dilakukan secara sistematis juga membantu dalam menjaga akurasi catatan inventaris dan memudahkan pemantauan terhadap Barang Milik Negara (BMN). Dengan demikian, langkah ini tidak hanya

mendukung pengelolaan aset yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada optimalisasi ruang penyimpanan dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Terakhir, pada rencana aksi monitoring terhadap sisa BMN yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP), khususnya untuk Barang Milik Negara (BMN) yang berupa tanah, gedung, dan bangunan, telah dimaksimalkan dengan berbagai upaya strategis. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap aset-aset tersebut untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi instansi pemerintah.

Dengan pendekatan yang sistematis, Tim Pengelola telah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap status penggunaan BMN, sehingga setiap aset dapat dikelola secara efisien. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, termasuk Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sejalan dengan kebijakan pengelolaan aset negara. Upaya maksimalisasi ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN, tetapi juga untuk mendukung pemanfaatan aset negara secara lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap tanah, gedung, dan bangunan yang dimiliki oleh negara dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

c. Opini BPK

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Opini BPK

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	Biro Keuangan

Tabel 3. 36 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Opini BPK

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sosialisasi pengisian Matriks Tabel A kepada seluruh unit kerja pemegang akun signifikan	1	-	-	-	Pada tahun 2024 telah dilaksanakan sosialisasi pengisian matriks Tabel A kepada seluruh unit kerja pemegang akun signifikan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Sosialisasi dan bimbingan teknis Kriteria Penetapan Akun Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal	1	-	-	-	Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Sosialisasi dan bimbingan teknis Kriteria Penetapan Akun Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal
Rekonsiliasi Internal dan Eksternal	Rekonsiliasi Internal Aset dan Persediaan Tiap Bulan	3	3	3	3	Pada tahun 2024 telah dilaksanakan secara rutin rekonsiliasi internal aset dan persediaan per bulannya
	Rekonsiliasi Eksternal Belanja dan Pendapatan Tiap Bulan	3	3	3	3	Pada tahun 2024 telah dilaksanakan secara rutin rekonsiliasi eksternal belanja dan pendapatan per bulannya
	Rekonsiliasi Eksternal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai	1	-	1	-	Pada tahun 2024 telah dilaksanakan rekonsiliasi eksternal piutang atas kelebihan pembayaran belanja pegawai dengan PT Taspen

Pada Tahun 2024, Biro Keuangan memiliki dua rencana aksi dalam opini BPK yaitu penguatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan serta rekonsiliasi internal dan eksternal. Pada rencana aksi penguatan engendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan telah melaksanakan sosialisasi pengisian Matriks Tabel A kepada seluruh unit kerja pemegang akun signifikan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja yang memegang akun signifikan mengerti dan memahami tata cara pengisian Matriks Tabel A. Matriks ini digunakan unit kerja terkait dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan untuk mencatat serta memantau realisasi anggaran, capaian kegiatan, dan kinerja keuangan dalam suatu unit kerja atau instansi.

Selain itu, Biro Keuangan juga telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Kriteria Penetapan Akun Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja atau instansi pemerintah dapat memahami dan melaksanakan pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan

belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan pemahaman yang jelas, meningkatkan akuntabilitas, meminimalisir kesalahan pengelompokan anggaran, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Rencana aksi kedua adalah Rekonsiliasi Internal dan Eksternal. Dalam hal ini, Biro Keuangan telah melakukan Rekonsiliasi Internal Aset dan Persediaan Tiap Bulan untuk memastikan bahwa catatan keuangan yang tercatat dalam pembukuan akuntansi sesuai dengan keadaan fisik aset dan persediaan yang ada pada suatu unit kerja atau instansi. Proses rekonsiliasi ini penting untuk menjaga akurasi, transparansi, dan keandalan laporan keuangan serta untuk memastikan bahwa aset dan persediaan yang dimiliki oleh organisasi tercatat dengan benar dan mencegah penyelewengan atau kehilangan aset. Selain itu, Biro Keuangan juga telah melakukan Rekonsiliasi Eksternal Belanja dan Pendapatan Tiap Bulan dengan mengidentifikasi potensi masalah untuk menjamin akurasi laporan keuangan melalui pencocokan catatan belanja dan pendapatan serta melakukan tindak lanjut dan pengendalian internal untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rekon.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
94,63% (sesuai 88,94% dan tidak dapat ditindaklanjuti 5,69%)	95%	88,24%	Inspektorat Utama

Tabel 3. 38 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
<i>Entry meeting</i> pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2014	Kegiatan <i>entry meeting</i> pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2014	1	-	-	-	Kegiatan <i>entry meeting</i> dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024
Penyusunan Rekapitulasi Tanggapan	Kegiatan rapat koordinasi penyusunan	-	1	-	-	Kegiatan rapat dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 7 Mei 2024

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Konsep Temuan BPK	konsep temuan BPK					
	Rekapitulasi tanggapan konsep temuan BPK	-	1	-	-	Penyusunan rekapitulasi tanggapan konsep temuan BPK dilaksanakan pada bulan Juni
Penyusunan Rencana Aksi Konsep LHP BPK	Rencana aksi konsep LHP BPK	-	1	-	-	Kegiatan penyusunan rencana aksi dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 14 Juni 2024
Penyusunan Rekapitulasi Tindak Lanjut 60 Hari LHP BPK	Kegiatan rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut 60 hari temuan BPK	-	-	1	-	Kegiatan rapat dilaksanakan pada tanggal 15 - 19 Agustus 2024
	Rencana aksi 60 hari	-	-	1	-	Kegiatan penyusunan rencana aksi 60 hari dilaksanakan pada tanggal 9-12 September 2024
Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	Kegiatan rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	1	-	-	Kegiatan rapat dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Juni 2024
	Matriks pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	-	1	-	-	Penyusunan Matriks dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 21 Juni 2024
	Kegiatan rapat koordinasi dengan BPK RI	-	1	-	-	Kegiatan rapat koordinasi dengan BPK RI dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024
Pemantauan TLHP Semester II 2024	Kegiatan rapat koordinasi dengan unit kerja	-	-	-	1	Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dengan unit kerja

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	yang memiliki temuan BPK					dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 8 November 2024
	Matriks pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	-	-	-	1	Penyusunan Matriks pemantauan TLHP BPK dilaksanakan pada tanggal 18-28 November 2024
	Kegiatan rapat koordinasi dengan BPK RI	-	-	-	1	Kegiatan rapat koordinasi dengan BPK dilaksanakan pada tanggal 29 November s.d. 12 Desember 2024
Penyusunan Tim TLHPKN	SK Tim TPKN	1	-	-	-	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 73/SEKJEN/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 3 Januari 2024
<i>Benchmarking</i>	Kegiatan <i>Benchmarking</i> ke Inspektorat Lombok Tengah	1	-	-	-	Kegiatan <i>Benchmarking</i> dalam rangka meningkatkan penyelesaian kerugian negara dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2024

Berdasarkan Laporan Kementerian PANRB, Realisasi Indikator Kegiatan Utama “Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan” pada Tahun 2024 sebesar 88,24%. Realisasi ini belum memenuhi target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 95%. Namun sebenarnya terdapat perbedaan perhitungan realisasi antara Kementerian PANRB dengan BPK RI yaitu sebagai berikut:

1. Kementerian PANRB memperoleh persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan tahun 2024 sebesar 88,24% dengan cara menghitung jumlah rekomendasi sampai dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 663 rekomendasi dengan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai dengan Semester I Tahun 2024 sebanyak 585 rekomendasi.
2. BPK RI memperoleh persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan 2 (dua) kali perhitungan yaitu di Semester I Tahun

2024 dan Semester II Tahun 2024. Di Semester I, BPK RI menghitung jumlah rekomendasi sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2022, dan untuk Semester II dihitung jumlah rekomendasi sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2023.

Untuk Semester I Tahun 2024, persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan tahun 2024 sebesar 95,12% dengan menghitung 615 rekomendasi dengan jumlah yang ditindaklanjuti sampai dengan Semester I Tahun 2024 sebanyak 585 rekomendasi. Perbedaan jumlah rekomendasi antara Kementerian PANRB dan BPK RI dikarenakan untuk Semester I Tahun 2024, **BPK RI tidak memasukkan jumlah rekomendasi pada Laporan Keuangan Tahun 2023 sebanyak 48 rekomendasi, tetapi jumlah tersebut dimasukkan pada perhitungan Semester II Tahun 2024.** Hal ini dikarenakan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 baru selesai diaudit pada Mei 2024, dan 48 rekomendasi ditindaklanjuti selama 60 hari di bulan Juli 2024, sehingga BPK menghitung jumlah rekomendasi pada Laporan Keuangan tahun 2023 pada pemantauan Semester II Tahun 2024 di bulan Desember 2024. **Untuk hasil pemantauan Semester II Tahun 2024, sampai saat ini belum mengeluarkan hasil pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan, sehingga belum ada hasil persentase penyelesaiannya.**

Dari penjelasan di atas, selama ini Sekretariat Jenderal DPR RI DPR RI mengacu pada realisasi yang dikeluarkan oleh BPK RI melalui Surat Nomor No. 205/S/V/07/2024 Tahun 2024 pada DPR RI tanggal 30 Juli 2024 yang diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 12 September 2024, maka capaian yang diraih oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada Semester I Tahun 2024 adalah sebesar **95,12%** yang terdiri 89,43% telah sesuai dengan rekomendasi (status 1) dan 5,69% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah (status 4).

Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan, yaitu:

1. Pada Triwulan I Tahun 2024, melaksanakan kegiatan *entry meeting* atas pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2024 dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024, Penyusunan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 73/SEKJEN/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Sekretariat Jenderal DPR RI tanggal 3 Januari 2024 dan Kegiatan *Benchmarking* dalam rangka meningkatkan penyelesaian kerugian negara dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2024.
2. Pada Triwulan II Tahun 2024, melaksanakan kegiatan rapat penyusunan konsep temuan BPK dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 7 Mei 2024, penyusunan rekapitulasi tanggapan konsep temuan BPK dilaksanakan pada bulan Juni 2024, kegiatan penyusunan rencana aksi konsep temuan BPK dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 14 Juni 2024, kegiatan rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Juni 2024, penyusunan matriks pemantauan TLHP BPK Semester I

- Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 21 Juni 2024, dan kegiatan rapat koordinasi dengan BPK RI dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024.
3. Pada Triwulan III Tahun 2024, melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut 60 hari temuan BPK dilaksanakan pada tanggal 15 - 19 Agustus 2024, dan kegiatan penyusunan rencana aksi 60 hari dilaksanakan pada tanggal 9 -12 September 2024.
 4. Pada Triwulan IV Tahun 2024, melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan pada tanggal 4 s.d. 8 November 2024, penyusunan matriks pemantauan TLHP BPK dilaksanakan pada tanggal 18 - 28 November 2024, dan kegiatan rapat koordinasi dengan BPK dilaksanakan pada tanggal 29 November s.d. 12 Desember 2024.

Kedepannya, untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Sekretariat Jenderal DPR RI berupaya menyelesaikan temuan BPK dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terbit, melakukan pemantauan secara intensif kepada unit kerja terkait serta koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan BPK RI dalam proses penyelesaian rekomendasi BPK termasuk pemenuhan eviden tindak lanjut, terutama untuk temuan di atas 10 tahun.

14. Penguatan Sistem Merit (Integrasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan Fungsional): Indeks Sistem Merit

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Indeks Sistem Merit

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
363	363	363	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Tabel 3. 40 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Indeks Sistem Merit

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pengelolaan aplikasi SiMata	Laporan pengelolaan aplikasi SiMata	-	1	-	1	1. Sejak tanggal 2 Juni 2022 Biro SDMA bersama Pustekinfo memulai langkah awal untuk membuat rancangan pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta (SiMata);

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						<p>2. Bersama dengan Pustekinfo, bagian PPK ASN Biro SDMA melakukan pengecekan dan pembaharuan data yang dilakukan melalui <i>input</i> manual;</p> <p>3. Aplikasi SiMata siap diuji cobakan pada bulan Desember 2022;</p> <p>4. Pada tanggal 10-12 April 2023, SiMata telah mampu menyajikan data <i>Talent Pool</i> Sekretariat Jenderal DPR RI secara riil;</p> <p>5. Pada Agustus 2023, aplikasi SiMata telah mencapai progres yang sangat baik, sehingga siap digunakan dalam Manajemen Talenta Sekretariat Jenderal DPR RI.</p>
Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 20 JP	Laporan pelaksanaan pelatihan per triwulan	1	1	1	1	Capaian Indikator Kinerja Persentase keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP dalam Satu Tahun sampai dengan Triwulan IV (per 19 November 2024) sesuai perjanjian kinerja adalah sebesar 99,2% dari target 62,5% pegawai yang mendapatkan kesempatan tersebut atau sebanyak 760 orang dari 768 orang
Evaluasi berkala penerapan sistem merit	Laporan penerapan sistem merit per semester	-	1	-	1	

Pada tahun 2024, Indeks Sistem Merit memperoleh nilai sebesar 363. Perolehan nilai tersebut sama dengan perolehan nilai pada tahun 2023 dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yaitu sebesar 355,5. Dalam hal ini, seluruh rencana aksi Indeks Sistem Merit juga telah seluruhnya terlaksana. Indeks Sistem Merit terdiri dari 3 (tiga) rencana aksi, yaitu pengelolaan aplikasi SiMata, pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 20 JP dan evaluasi berkala penerapan sistem merit.

Pada rencana aksi pengelolaan aplikasi SiMata dilaksanakan pada Triwulan II dan IV. Sejak tanggal 2 Juni 2022 Biro SDMA bersama Pustekinfo memulai langkah awal untuk membuat rancangan pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta (SiMata). Bersama dengan Pustekinfo, Bagian PPK ASN Biro SDMA melakukan pengecekan dan pembaharuan data yang dilakukan melalui *input* manual. Aplikasi SiMata siap diuji cobakan pada bulan Desember 2022. Pada tanggal 10-12 April 2023, SiMata telah mampu menyajikan data *Talent Pool* Sekretariat Jenderal DPR RI secara riil. Kemudian pada Agustus 2023, aplikasi SiMata telah mencapai progres yang sangat baik, sehingga siap digunakan dalam Manajemen Talenta Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selanjutnya pada rencana aksi pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 20 JP, telah terlaksana pada Triwulan I s.d. IV. Capaian Indikator Kinerja Persentase keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP dalam Satu Tahun sampai dengan Triwulan IV (per 19 November 2024) sesuai perjanjian kinerja adalah sebesar 99,2% dari target 62,5% pegawai yang mendapatkan kesempatan tersebut atau sebanyak 760 orang dari 768 orang. Bersamaan dengan itu, rencana aksi evaluasi berkala penerapan sistem merit juga telah terlaksana pada Triwulan II dan IV dengan *ouput* laporan penerapan sistem merit per semester.

15. Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAKHLAK

Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAKHLAK

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
61,7	75	77,2%	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

Tabel 3. 42 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAKHLAK

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa di Aplikasi SIRAJIN	Penyusunan Soal Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Penyusunan Soal Kuis BerAKHLAK dilaksanakan pada bulan Mei. Soal-soal dibuat oleh Widyaiswara dengan materi dari Kementerian PANRB dan juga dari berbagai sumber dengan soal berjumlah 30 (tiga puluh) soal
	Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Telah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kuis BerAKHLAK pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Pusbangkom
	Pengumuman Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Telah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kuis BerAKHLAK pada tanggal 29 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Pusbangkom
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Kegiatan dilaksanakan pada 22 Agustus 2024
Penguatan nilai-nilai BerAKHLAK	Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Seminar Penguatan Core Value BerAKHLAK	-	-	1	-	Kegiatan Seminar Core Value BerAKHLAK dilaksanakan 25 September 2024. Sudah disebar undangan kegiatan kepada

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Kegiatan Seminar Penguatan <i>Core Value</i> BerAKHLAK	-	-	1	-	responden survei. Namun hingga batas waktu pengisian 28 September 2024, Minimum Responden survei belum terpenuhi untuk level pendidikan D3 dan SMA
Sosialisasi Panduan <i>Core Value</i> BerAKHLAK	Sosialisasi Pedoman dan Panduan <i>Core Value</i> BerAKHLAK di Portal DPR	-	1	-	-	Telah terlaksana pengumuman pelaksanaan Kuis <i>Core Value</i> BerAKHLAK pada 30 Mei 2024 melalui Portal SIRAJIN DPR
Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK telah terlaksana dengan 3 (tiga) orang pemenang kuis BerAKHLAK. Pengumuman Pemenang dimajukan dari rencana seharusnya karena bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI tanggal 29 Agustus 2024

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka penguatan nilai-nilai BerAKHLAK bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). BerAKHLAK, sebagai *core values* ASN, menjadi landasan utama dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.

Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2023, Indeks BerAKHLAK Sekretariat Jenderal DPR RI tercatat pada angka 61,7%. Dengan adanya berbagai program peningkatan kapasitas ASN, target untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 75%. Melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, realisasi indeks ini berhasil melampaui target, mencapai 77,2% dengan Kategori Sehat. Capaian ini menunjukkan

keberhasilan upaya penguatan nilai-nilai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Untuk mencapai target tersebut, beberapa langkah strategis telah diimplementasikan, termasuk pelaksanaan Kuis BerAKHLAK, seminar penguatan *core values*, serta sosialisasi pedoman dan panduan BerAKHLAK.

Sebagai bagian dari strategi edukasi dan internalisasi nilai-nilai ASN, Kuis BerAKHLAK diadakan melalui Aplikasi SIRAJIN. Penyusunan soal kuis dilakukan pada bulan Mei 2024 oleh para Widyaiswara, dengan mengacu pada materi dari Kementerian PANRB dan sumber-sumber relevan lainnya. Sebanyak 30 (tiga puluh) soal berhasil disusun untuk kuis ini. Sebagai langkah persiapan, rapat koordinasi dilaksanakan pada 29 Mei 2024, diikuti dengan pengumuman resmi mengenai pelaksanaan kuis melalui Portal SIRAJIN DPR pada 30 Mei 2024. Setelah kuis selesai dilaksanakan, penyusunan laporan pelaksanaan kuis dilakukan pada 22 Agustus 2024. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi ASN, pemberian penghargaan kepada pemenang kuis BerAKHLAK diadakan bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI pada 29 Agustus 2024.

Selain kuis, upaya penguatan nilai-nilai BerAKHLAK juga dilakukan melalui Seminar Penguatan *Core Values* ASN, yang dilaksanakan pada 25 September 2024. Sebelumnya, rapat koordinasi telah diadakan untuk memastikan persiapan yang matang, termasuk penyebaran undangan kepada responden survei. Namun, hingga batas waktu pengisian survei pada 28 September 2024, jumlah responden dari kategori pendidikan D3 dan SMA masih belum memenuhi batas minimum yang ditentukan. Sebagai bagian dari sosialisasi yang lebih luas, pedoman dan panduan BerAKHLAK juga diperkenalkan kepada seluruh ASN melalui Portal DPR. Sosialisasi ini bertepatan dengan pengumuman pelaksanaan kuis pada 30 Mei 2024, sehingga ASN dapat mengakses informasi penting mengenai implementasi *Core Values* dalam pekerjaan sehari-hari.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan legislatif. Keberhasilan ini tercermin dalam peningkatan Indeks BerAKHLAK yang melampaui target yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan ke depan, seperti minimnya partisipasi responden dalam survei, terutama dari kelompok ASN dengan latar belakang pendidikan tertentu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi. Ke depan, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif akan terus mengembangkan program yang lebih inovatif guna memastikan penerapan nilai-nilai ASN yang lebih optimal.

16. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

a. Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
Sangat Baik (3,725 atau 93,13)	Sangat Baik (3,73 atau 93,25)	Sangat Baik (3,738 atau 93,45)	Pusat Analisis Keperlemenan

Tabel 3. 44 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penyusunan Pedoman survei di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi	Terbentuknya Tim Penyusun Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Tanggal 16 Januari 2024, telah dilaksanakan pertemuan pendahuluan meminta arahan kepada Kepala Pusat Analisis Keperlemenan dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi mengenai poin-poin penting dalam
	Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	penyelenggaraan SKM pada Tahun 2024. Tanggal 17 Januari 2024, mendapat persetujuan untuk membentuk Tim <i>Squad</i> #1 yang ditugaskan menyusun Pedoman Penyelenggaraan Survei di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi,

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						berkelanjutan, dan berkesinambungan
Penguatan Standar Pelayanan	Tersusunnya kuesioner Reviu Standar Pelayanan	80	-	-	-	Tanggal 6 Februari 2024, telah dilaksanakan pembahasan informal mengenai standar pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Bagian Ortala dan Bagian PKORB
	Terlaksananya Pendampingan Pengisian Kuesioner yang diawali dengan Sosialisasi pengisian	80	-	-	-	Tanggal 15 Februari 2024, telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama Bagian Ortala, Bagian PKORB, dan Bagian Humas mengenai rencana untuk melakukan survei Reviu Standar Pelayanan, yang akan diinisiasi oleh Bagian Ortala
	Terlaksananya kegiatan pengisian survei	80	-	-	-	Tanggal 15 Maret 2024, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Reviu Standar Pelayanan yang diinisiasi oleh Bagian Ortala bekerja sama dengan Pusat Analisis Keparlemenan. Kegiatan ini sejalan dengan upaya melakukan penguatan atas pelaksanaan survei layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal DPR RI

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Terlaksananya <i>input</i> data kuesioner survei yang telah diisi	-	1	-	-	Tim SKM mulai melakukan <i>input</i> data manual baik yang berasal dari kuesioner <i>offline</i> maupun
	Terlaksananya pengolahan data kuesioner	-	1	-	-	penarikan data dari semua <i>barcode</i> dan <i>link</i> yang ada. Selanjutnya dilakukan pengolahan data di masing-masing unit penyedia dan pengelola layanan, sehingga diperoleh nilai untuk masing-masing indeks Eselon II
	Tersusunnya Laporan Reviu Standar Pelayanan	-	1	-	-	Selanjutnya Tim SKM mulai menyusun Laporan Eselon I sebanyak 4 (empat) laporan dan Laporan Eselon II sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan. Laporan tersebut kemudian menjadi lampiran dalam Laporan Sekretariat Jenderal DPR RI yang di <i>upload</i> melalui <i>link</i> Kementerian PANRB
Implementasi Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terintegrasi	Tersusunnya Laporan Survei pada 13 (tiga belas) area sebagai awalan penggunaan pedoman Survei Terintegrasi	-	1	-	-	Pada saat ini sudah tersusun Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI oleh Tim Penyusun inti yang merupakan <i>output</i> Triwulan I

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penguatan Penyelenggaraan Survei	Pembuatan Surat Edaran/ Peraturan Sekretaris Jenderal atau Nota Dinas dari Kepala Pusat Analisis Keparlemenan	-	-	1	-	Disampaikan surat edaran atau nota dinas dari Kepala Pusat Analisis Keparlemenan sebagai penyelenggara dari kegiatan survei persepsi masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
	Pengembangan Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi	-	-	1	-	Telah terselenggara dengan menggunakan aplikasi Google Drive yang memberikan keleluasaan masing-masing unit layanan untuk berinteraksi dengan pengguna layanannya sehingga dapat meminta penilaian kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Bimbingan teknis pengisian dan pengelolaan kuesioner telah dilakukan secara <i>hybrid</i> dengan mengundang seluruh unit kerja Eselon III di setiap Biro dan Eselon IV di setiap Pusat, melalui koordinasi Bagian PKORB Biro Perencanaan dan Organisasi
Penyelenggaraan Survei Terintegrasi,	Terbentuknya Tim Pelaksana Survei Kepuasan	-	-	1	-	Untuk memberikan dukungan kemudahan dan kecepatan dalam

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
berkelanjutan, dan berkesinambungan	Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI					penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat tersebut, baik melalui <i>offline</i> bagi Anggota DPR RI dan <i>online</i> untuk pengguna layanan non Anggota DPR RI, maka juga disediakan <i>barcode online</i> untuk setiap unit kerja Kesetjenan Eselon II. <i>Update</i> informasi terkait penyelenggaraan survei bagi seluruh unit kerja Kesetjenan dapat diakses pada <i>link</i> : https://bit.ly/SKMSekretariatJenderalDPRRI
	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	-	-	1	-	
	Tersusunnya Laporan SKM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024	-	-	-	25	
Optimalisasi Evaluasi dan Tindak Lanjut SKM	Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Survei ini dilakukan sebagai evaluasi atas dukungan dan kinerja layanan yang telah diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI selama tahun 2024 kepada Anggota

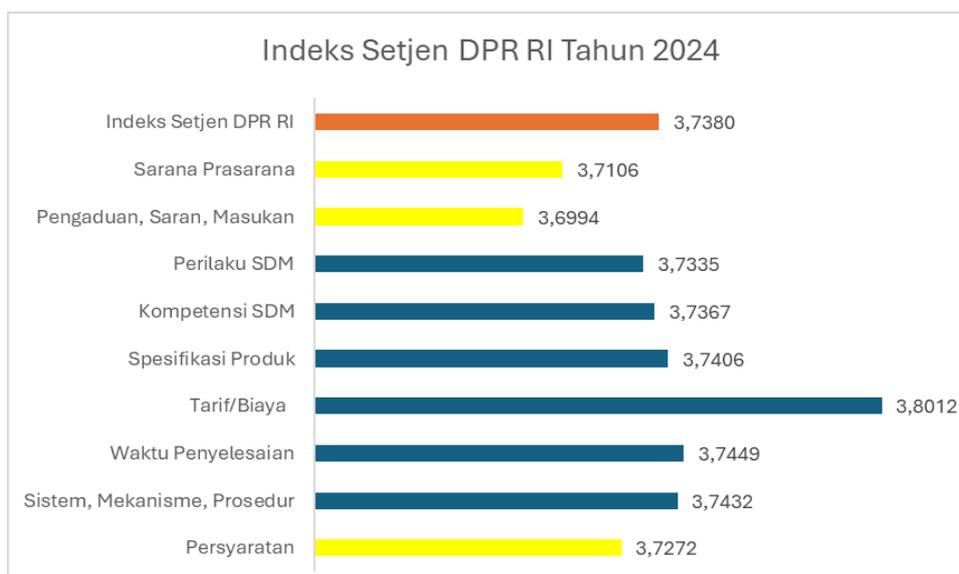
Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Tersusunnya Laporan Rekomendasi atas Evaluasi hasil SKM	-	-	-	1	DPR RI Periode 2019–2024, Mitra Kesekretariatan Jenderal, dan Masyarakat Umum
	Penyampaian Laporan dan Hasil Penilaian Kinerja Survei per unit kerja kepada Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai salah satu pengukuran dalam Penilaian Kinerja	-	-	-	1	Hasil survei kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan administrasi, persidangan dan keahlian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI secara keseluruhan menunjukkan nilai indeks kepuasan 3,7380 atau nilai interval konversi 93,4510. Apabila dikonversi dengan nilai interval mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka predikat Sekretariat Jenderal DPR RI bukan saja dapat mempertahankan dalam kategori A (Sangat Baik), tetapi juga meningkat dengan capaian 3,738 atau 100,35%, jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,725

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu bentuk komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus meningkatkan layanan dengan melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI oleh Anggota DPR

RI sebagai *user* utama, maupun pengguna layanan lainnya. Sejak pertama kali dilakukan, penilaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan tren peningkatan cukup signifikan.

Peningkatan kepuasan atas dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, harus dipahami juga tidak mungkin terus mengalami peningkatan yang eksponensial atau eskalatif. Meski begitu, upaya Sekretariat Jenderal DPR RI mewujudkan perbaikan dan tindak lanjut dari segala permasalahan dan pengaduan terus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena kinerja layanan Sekretariat Jenderal DPR RI pada hakikatnya sudah mencapai puncak penilaian yaitu “A” atau “Sangat Baik” dengan rentang penilaian 88,31 s.d. 100,00, dimana Sekretariat Jenderal DPR RI sudah mencapai 3,738 atau 93,45. Artinya menjaga tetap berada dalam level kategori “A” atau “Sangat Baik”, menjadi satu keniscayaan dan tantangan yang dihadapi dalam tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat 9 (sembilan) unsur yang dilakukan penilaian. Dari kesembilan unsur penilaian layanan, unsur Tarif/Biaya mendapatkan nilai indeks tertinggi yaitu 3,8012 atau nilai interval konversi 95,03 dan unsur penilaian Pengaduan, Saran, dan Masukan memperoleh nilai indeks terendah yaitu 3,6994 atau nilai interval konversi 92,485. Namun demikian, indeks unsur Pengaduan, Saran, dan Masukan telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Gambaran hasil survei tersebut memicu Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus lebih merespons cepat, tanggap, dan akurat atas pengaduan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh Anggota



Gambar 3. 17 Indeks SKM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

DPR RI. Kanal-kanal atau media penyampaian pengaduan, saran, dan masukan juga lebih mudah dan inovatif.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam upaya memulai Survei Kepuasan Masyarakat, yang diselenggarakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan, dengan melibatkan seluruh jajaran unit setingkat Eselon II dengan masing-masing jajaran di bawahnya. Penyelenggaraan survei juga dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur pengguna layanan baik Anggota DPR RI, mitra kerja Kementerian/Lembaga, PNS eksternal maupun internal, tenaga ahli, asisten administrasi anggota, swasta, pensiunan, maupun masyarakat umum. Namun siapa saja responden pengguna layanan, sangat bergantung pada tupoksi dari masing-masing unit kerja yang bersangkutan dan tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Keberhasilan ini tercermin dalam peningkatan Indeks NI ataupun NIK dari SKM, yang melampaui target yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan ke depan, seperti partisipasi responden dalam survei di masing-masing unit kerja belum berjalan seperti *business as usual*, tetapi terkesan masih dipaksakan, dan perlu diingatkan berkali-kali. Harapannya ke depan, telah tumbuh kesadaran, komitmen, dan pembiasaan untuk selalu memintakan penilaian atau evaluasi kinerja kepada para pihak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi responden untuk berkontribusi aktif. Ke depan, Pusat Analisis Keparlemen akan terus menjalin kerja sama dengan Biro Persidangan I dalam mengoptimalkan responden yang berasal dari Anggota DPR RI. Selain itu, diperlukan juga kerja sama dengan Pusat Teknologi Informasi untuk terus mengembangkan program yang lebih inovatif guna memastikan penyelenggaraan survei yang lebih optimal.

b. Indeks Pelayanan Publik

Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dengan Target Indikator Indeks Pelayanan Publik

Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
4,4	4,51	4,74	Biro Protokol dan Humas

Tabel 3. 46 Rencana Aksi dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pembentukan Tim Pendampingan Unit Lokus	Dokumen Surat Tugas/SK Tim	1	-	-	-	Telah terlaksana dengan diterbitkannya Surat Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Evaluasi (ULE) dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional						14/OT.05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024
Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2024	Hasil Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim	1	-	-	-	Telah terlaksana pada tanggal 7 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Biro Protokol dan Humas Dihadiri oleh Kepala Biro Protokol dan Humas (PIC Indeks Pelayanan Publik), Kepala Bagian Layanan Kesehatan (Kepala Unit Kerja yang ditunjuk sebagai ULE) dan Tim Pendamping dan Evaluasi PEKPPP 2024
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Tersedianya Laporan FKP	-	1	-	-	Telah terlaksana dan tersedia laporan pelaksanaan FKP Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR RI pada tanggal 24 November 2024, dan telah dilaporkan kepada Kementerian PANRB, melalui Surat Sekretaris Jenderal No. B/15059/OT.03.02/11/2024 tanggal 26 November 2024
Melaksanakan Survei Kepuasan masyarakat (SKM)	Tersedianya Laporan SKM	-	-	1	-	Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, dan telah diterbitkan laporan SKM yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun SKM pada tanggal 3 Mei 2024
Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional	Tersedianya laporan PEKPPP	-	-	1	-	Telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Sekretariat Jenderal DPR RI, dan telah diterbitkan laporan pelaksanaan kegiatan yang berisikan hasil pengukuran PEKPPP Mandiri Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR RI pada tanggal 27 Desember 2024
Pelaporan PEKPPP ke Kementerian PANRB	Dokumen tanda terima pelaporan PEKPPP dari Kementerian PANRB	-	-	-	1	Telah disampaikan laporan pelaksanaan PEKPPP dengan Unit Lokus Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Bagian Pelayanan Kesehatan Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI dan telah ditandatangani Bersama Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Tim Evaluator dari Kementerian PANRB diketahui oleh Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 Di Ruang Rapat Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil FKP dan SKM	Tersedianya dokumen RTL	-	-	1	-	Telah disusun Laporan Rencana Tindak Lanjut atas Hasil SKM dan FKP atas Pelayanan Kesehatan di Bagian Pelayanan Kesehatan Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan sebagai Penanggung Jawab

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						layanan pada tanggal 12 Juni 2024
Pelaksanaan RTL	Capaian realisasi pelaksanaan RTL	-	-	-	100%	Telah dilakukan seluruh rencana tindak lanjut perbaikan layanan di tahun sebelumnya (2023) dan telah disusun Laporan Tindak Lanjut yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan sebagai Unit Lokus Evaluasi pada tanggal 31 Agustus 2023

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indeks yang melibatkan banyak unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, capaian IPP sebesar 4,74 dari target yang dicanangkan sebesar 4,51 merupakan buah dari kerja sama Tim yang baik. Dalam hal aspek kebijakan pelayanan peran Bagian Organisasi dan Tatalaksana menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh Pelayanan Publik di Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki dokumen Standar Pelayanan yang proses pembentukan dan evaluasinya dijalankan dengan kaidah-kaidah yang benar.

Selain itu, komitmen dan dukungan seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) sebagai garda terdepan pelayanan juga terus didorong oleh pimpinan unit kerja untuk terus meningkatkan pelayanan kepada publik. Mekanisme *reward* dan *punishment* juga dijalankan untuk memberikan motivasi kepada seluruh UPP dan SDM yang terlibat dalam pelayanan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan. Sepanjang tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi bekerja sama dengan Biro Protokol Humas dan pihak-pihak terkait lainnya berhasil menyelenggarakan dua kali kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Sekretariat Jenderal DPR RI, untuk menciptakan iklim kompetitif dalam meningkatkan pelayanan publik.



Gambar 3. 18 Foto Kegiatan Pengumuman Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI 2024



Gambar 3. 19 Foto Kegiatan Observasi Penilaian Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI 2024

Dalam pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, UPP yang memiliki inovasi layanan yang baik mendapat penghargaan antara lain adanya insentif anggaran pelayanan publik di tahun 2025. Siklus pelayanan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi perlu dijaga untuk memastikan perbaikan layanan di tiap UPP terselenggara dengan baik. Dengan berjalannya siklus perbaikan layanan, upaya perbaikan layanan untuk seluruh pelayanan publik di Sekretariat Jenderal DPR RI akan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.

B. Reformasi Birokrasi Tematik

1. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana individu atau keluarga tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Indikator untuk mengukur kemiskinan antara lain: garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan pengeluaran per kapita. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang kompleks di Indonesia karena isu kemiskinan terkait erat dengan sektor lain seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, perumahan dan infrastruktur, pertanian, lingkungan dan perlindungan sosial.

Indonesia adalah negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah, namun ironisnya, sebagian besar nelayan yang menjadi tulang punggung sektor perikanan masih hidup dalam kemiskinan. Data menunjukkan bahwa nelayan, terutama nelayan skala kecil, menghadapi berbagai tantangan yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan mereka. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses modal, permainan harga hasil tangkapan, dominasi armada tangkap asing, serta minimnya penguasaan teknologi dan pengetahuan modern menjadi penyebab utama rendahnya daya saing mereka. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang serius antara potensi sumber daya yang dimiliki dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Masalah kemiskinan di kalangan nelayan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup mereka, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Dalam banyak kasus, nelayan miskin cenderung melakukan praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Hal ini memperburuk degradasi ekosistem laut, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan ekonomi biru Indonesia. Selain itu, upaya pemberdayaan nelayan seringkali terhambat oleh kurangnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Program-program yang ada sering berjalan parsial, tanpa pendekatan holistik yang mempertimbangkan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, Reformasi Birokrasi (RB) Tematik untuk pengentasan kemiskinan nelayan menjadi langkah strategis untuk menjawab kompleksitas masalah ini. Dengan pendekatan tematik, RB tidak hanya diarahkan pada perbaikan internal birokrasi, tetapi juga untuk menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Fokus ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional, yang menempatkan penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal sebagai prioritas utama. Melalui RB Tematik ini, upaya pengentasan kemiskinan nelayan dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai program lintas sektor. Dukungan terhadap legislasi, pengawasan, dan penganggaran terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan menjadi prioritas utama. Selain itu, pendekatan berbasis data digunakan untuk memastikan program tepat sasaran, sedangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat lokal, diharapkan dapat memperkuat efektivitas kebijakan.

Dengan memusatkan perhatian pada pengentasan kemiskinan nelayan, RB Tematik ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendukung keberlanjutan sumber daya laut sebagai aset strategis bangsa. Inisiatif ini tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga menjadi contoh konkret bagaimana RB dapat diarahkan untuk memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran penting dalam memberi dukungan substansi berupa kajian, analisis atau Naskah Akademik serta layanan persidangan dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI dalam rangka mendukung pemerintah dalam merealisasikan target penurunan kemiskinan. Dukungan substansi diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

- Menyusun kajian terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan sebagai bahan pertimbangan pembahasan RUU tentang Kelautan;

- Menyusun kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan baik dari aspek peraturan perundang-undangan, pengawasan maupun anggaran;
- Menyampaikan kajian tersebut dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran serta pengawasan oleh DPR RI terkait pengendalian inflasi. Kajian ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Alat Kelengkapan DPR RI, Tim Pengendali Inflasi Pusat, dan Perguruan Tinggi Mitra Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 3. 47 Capaian RB Tematik Tema Pengentasan Kemiskinan

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi	Persentase Realisasi
Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan sebagai bahan pertimbangan pembahasan RUU tentang Kelautan	Tersampaikan nya hasil kajian kepada Pansus RUU Kelautan	1 dokumen	1 dokumen	100%
Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan baik dari aspek peraturan perundang-undangan, pengawasan maupun anggaran	Tersampaikan nya hasil kajian kepada 15 AKD/Kementrian/Lembaga/ Perguruan Tinggi	15 Lembaga	15 Lembaga	100%

Capaian RB Tematik dalam tema pengentasan kemiskinan dirancang untuk diimplementasikan secara bertahap sepanjang tahun, dengan fokus pada aspek pengelolaan sumber daya kelautan, pemberdayaan nelayan, dan penyediaan kajian

substansi bagi proses legislasi, pengawasan, serta penganggaran. Setiap triwulan memiliki target yang terukur dan *output* spesifik untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh target terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan untuk tahun 2024 telah tercapai sepenuhnya. Hasil kajian telah disampaikan sesuai target, baik kepada Panitia Khusus (Pansus) RUU Kelautan maupun ke 15 lembaga terkait. Dengan persentase realisasi mencapai 100%, tabel ini menegaskan bahwa seluruh sasaran tematik yang direncanakan telah direalisasikan sesuai indikator yang ditetapkan.

Triwulan I

Pada triwulan pertama, langkah awal difokuskan pada pembentukan Tim Asistensi untuk mendukung Panitia Khusus (Pansus) RUU Kelautan. Tim ini bertugas memberikan dukungan teknis dan substansi dalam pembahasan RUU tersebut. Selain itu, diskusi awal dengan para pakar juga dilaksanakan untuk mendalami kebijakan perikanan terukur. Dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, pengumpulan informasi dari daerah terkait kebijakan ini juga menjadi agenda penting. Hasil dari berbagai aktivitas tersebut, termasuk laporan diskusi dan data yang terkumpul, menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan rencana aksi berikutnya.

Triwulan II

Memasuki triwulan kedua, fokus diarahkan pada diskusi dengan pakar yang secara khusus membahas pemberdayaan nelayan, terutama nelayan skala kecil yang rentan terhadap tantangan ekonomi. Diskusi ini diikuti dengan pengumpulan data lapangan untuk memahami kondisi aktual nelayan di berbagai daerah. Data yang diperoleh menjadi bahan utama dalam penyusunan kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan. Dokumen kajian yang dihasilkan tidak hanya menjadi bahan pertimbangan penting bagi Pansus RUU Kelautan, tetapi juga menjadi referensi dalam pembahasan isu-isu yang lebih luas terkait sektor kelautan dan perikanan.

Triwulan III

Pada triwulan ketiga, upaya pendampingan pembahasan RUU Kelautan dilakukan secara intensif. Pendampingan ini didukung oleh hasil kajian yang telah disusun sebelumnya, sehingga proses legislasi dapat berjalan lebih efektif. Pada tahap ini, penyusunan kajian akhir terkait sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan juga dilakukan untuk memastikan semua temuan dan rekomendasi terdokumentasi dengan baik. Dokumen kajian akhir ini dirancang sebagai acuan yang komprehensif dalam pengambilan keputusan strategis di sektor kelautan.

Triwulan IV

Akhirnya, pada triwulan keempat, hasil kajian yang telah disusun disampaikan kepada 15 lembaga terkait, termasuk Alat Kelengkapan DPR RI, Kementerian, Lembaga Negara, dan Perguruan Tinggi. Penyampaian hasil kajian dilakukan melalui *platform* berbasis *data sharing* yang terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan hasil kajian dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengentasan kemiskinan di sektor kelautan.

Daftar AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi Penerima Kajian RB Tematik Kemiskinan:

1. Komisi I DPR RI
2. Komisi II DPR RI
3. Komisi IV DPR RI
4. Komisi V DPR RI
5. Komisi VI DPR RI
6. Komisi VIII DPR RI
7. Komisi X DPR RI
8. Komisi XI DPR RI
9. Komisi XII DPR RI
10. Badan Anggaran
11. Badan Legislasi
12. BAKN
13. Universitas Indonesia
14. IPB University
15. PKN STAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan RB Tematik ini tidak hanya berfokus pada upaya teknis dan administratif, tetapi juga pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Setiap capaian yang dirancang bertujuan untuk menciptakan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, melalui pendekatan yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

2. Peningkatan Investasi

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam hal Pariwisata. Namun sektor pariwisata Indonesia masih mengalami kekurangan dalam hal infrastruktur pariwisata yang berfungsi untuk menopang peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata di Indonesia. Terkait hal ini, DPR RI bersama Pemerintah melakukan pembahasan UU Pariwisata yang menekankan pentingnya peningkatan investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.

Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan substansi dalam pembahasan UU Pariwisata sebagai berikut:

- Memberikan masukan atas norma-norma pada Rancangan Undang-Undang terkait pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pada sektor pariwisata;
- Menyusun kajian terkait faktor-faktor rendahnya investasi sektor pariwisata terutama hambatan aspek anggaran dan regulasi;
- Menyampaikan kajian terkait faktor-faktor yang menjadi determinan rendahnya investasi sektor pariwisata di Indonesia kepada Pemangku Kepentingan terkait, utamanya Alat Kelengkapan DPR RI, Kementerian Pariwisata, dan Perguruan Tinggi Mitra Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 3. 48 Capaian RB Tematik Tema Peningkatan Investasi

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi	Persentase Realisasi
Tersusunnya norma yang berkaitan dengan penguatan investasi di sektor pariwisata dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang	Tersusunnya norma penguatan investasi di sektor pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Tersirkulasinya hasil kajian tentang determinan rendahnya investasi di sektor pariwisata baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun anggaran	Tersampaiannya hasil kajian kepada 15 AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	15 AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	15 AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	100%

RB Tematik Peningkatan Investasi Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Fokus pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi Tahun Anggaran 2024 adalah pelaksanaan dukungan substansi mengenai investasi yang

diatur pada Rancangan Undang-Undang Pariwisata dan penyusunan kajian mengenai investasi di sektor pariwisata yang disirkulasikan kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Kementerian, Lembaga, dan Perguruan Tinggi terkait. Tahapan RB Tematik telah disusun secara sistematis yang dibagi pada empat triwulan dengan hasil yang optimal pada tiap triwulan. Mengacu pada laporan realisasi RB Tematik tiap triwulan, diketahui bahwa seluruh target RB Tematik tiap triwulan telah tercapai. Secara umum pelaksanaan RB Tematik tiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan I

Pada fase awal pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik Investasi 2024, dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Tim Penyusunan Kajian terkait dengan investasi di sektor pariwisata. Tim yang dibentuk merupakan tim gabungan dari beberapa pusat di Badan Keahlian DPR RI agar dapat memperoleh pandangan yang utuh dan analisis yang mencakup berbagai disiplin keilmuan dalam memberikan dukungan substansi yang komprehensif.

Triwulan II

Pada triwulan kedua mulai dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Kajian atas Rancangan Undang-Undang Pariwisata. Proses penyusunan mencakup pemetaan permasalahan terkait investasi sektor pariwisata, diskusi pakar dalam rangka memperoleh pemahaman mendalam atas permasalahan investasi sektor pariwisata, dan penulisan Naskah Akademik dan Kajian. Diskusi pakar dilakukan tidak hanya dengan pihak praktisi, namun juga dengan perguruan tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI yang berpengalaman dalam melakukan penelitian dan kajian berkolaborasi dengan Badan Keahlian DPR RI.

Triwulan III

Proses penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang, dan Kajian masih dilakukan dengan melakukan penambahan-penambahan sejalan dengan adanya data terbaru beserta studi literatur kontemporer. Sejalan dengan hampir selesainya proses penyusunan Naskah Akademik dan Kajian, dilakukan proses diskusi dengan Biro Persidangan I dan II selaku koordinator Bagian Sekretariat AKD DPR RI. Proses sosialisasi dilakukan untuk menunjukkan proses penyampaian kajian menggunakan sistem SIMFONI secara daring sehingga tidak perlu dilakukan penyampaian secara fisik.

Triwulan IV

Pada triwulan IV, dilakukan penyampaian hasil kajian terhadap pemangku kepentingan terkait kajian investasi sektor pariwisata. Dengan penyebaran hasil kajian secara digital, kajian yang telah disusun tersampaikan secara efektif, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh Anggota DPR RI terkait. Kajian juga dimungkinkan untuk

mendapatkan masukan dari perguruan tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI agar semakin berkualitas dan memberikan penjelasan yang mendalam.

Daftar AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi yang menerima kajian investasi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Komisi I
2. Komisi II
3. Komisi V
4. Komisi VII
5. Komisi VII
6. Komisi X
7. Komisi XI
8. Komisi XII
9. Badan Anggaran
10. Badan Legislasi
11. BAKN
12. Universitas Indonesia
13. Universitas Gadjah Mada
14. IPB University
15. PKN STAN

3. Pengendalian Inflasi

Ketidakstabilan dan tingginya inflasi di Indonesia merupakan permasalahan ekonomi yang seringkali terjadi dan dapat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan tingginya inflasi antara lain: kenaikan harga komoditas, meningkatnya permintaan uang, dan ketidakstabilan nilai tukar. Strategi umum pengendalian inflasi harus terus ditempuh untuk menciptakan harga yang terjangkau, ketersediaan pasokan yang mencukupi, dan distribusi yang semakin lancar, terutama untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan gangguan cuaca yang berpotensi menimbulkan risiko gejolak harga pangan. Inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh kelompok *volatile food* yang meningkat dan menjadi salah satu tantangan karena nilainya cukup tinggi beberapa waktu belakangan ini. Peningkatan gejolak harga komoditas pangan saat ini, terutama beras dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor musiman periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pergeseran musim tanam akibat dampak El-Nino. Hal ini telah menjadi perhatian DPR RI bersama Pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan gejolak harga komoditas tersebut. Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI turut berperan dalam mendukung DPR RI mengendalikan inflasi. Melalui dukungan substansi, persidangan dan administrasi, adapun dukungan yang diberikan Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu:

- Menyusun kajian terkait pengendalian inflasi, khususnya upaya mengatasi ketidakseimbangan produksi dan konsumsi komoditas pangan dan hortikultura;

- Menyampaikan kajian tersebut dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran serta pengawasan oleh DPR RI terkait pengendalian inflasi. Kajian ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Alat Kelengkapan DPR RI, Tim Pengendali Inflasi Pusat, dan Perguruan Tinggi Mitra Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 3. 49 Capaian RB Tematik Tema Pengendalian Inflasi

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi	Persentase Realisasi
Tersirkulasinya hasil kajian dalam proses pembahasan anggaran dan pengawasan terkait pengendalian inflasi, khususnya upaya mengatasi ketidakseimbangan produksi dan konsumsi komoditas pangan dan hortikultura	Tersampainya hasil kajian kepada 15 AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	15 AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	15 AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	100%

RB Tematik dengan fokus pada pengendalian inflasi dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2024, dengan menitikberatkan pada penyusunan kajian yang mendalam terkait ketidakseimbangan produksi dan konsumsi komoditas pangan serta hortikultura. Setiap triwulan ditetapkan target yang jelas dan hasil yang terukur untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi berjalan efektif. Berdasarkan data, seluruh target yang berkaitan dengan pengendalian inflasi selama tahun 2024 berhasil dicapai sepenuhnya. Kajian yang dihasilkan telah disampaikan kepada 15 pemangku kepentingan, termasuk Alat Kelengkapan DPR RI, Tim Pengendali Inflasi Pusat, serta Perguruan Tinggi Mitra Badan Keahlian DPR RI. Dengan capaian realisasi 100%, ini menunjukkan bahwa seluruh tujuan tematik berhasil direalisasikan sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Triwulan I

Pada tahap awal, difokuskan pada pembentukan Tim Penyusun Kajian yang bertugas mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan produksi dan konsumsi pangan. Pemetaan ini penting untuk memahami akar persoalan inflasi, khususnya yang disebabkan oleh volatilitas harga pangan akibat faktor musiman seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta dampak perubahan iklim seperti El-Nino yang mempengaruhi musim tanam.

Triwulan II

Memasuki triwulan kedua, kegiatan berlanjut dengan mengadakan diskusi intensif bersama para pakar dan mitra kerja Badan Keahlian DPR RI. Diskusi ini bertujuan memperdalam pemahaman terkait faktor-faktor ketidakseimbangan yang memicu inflasi. Temuan dari diskusi ini menjadi landasan utama dalam penyusunan kajian awal yang memberikan rekomendasi solusi konkret untuk menstabilkan produksi dan konsumsi pangan.

Triwulan III

Pada triwulan ketiga, fokus diarahkan pada finalisasi kajian dengan melakukan analisis yang lebih komprehensif. Tim juga melakukan koordinasi dengan Biro Persidangan I dan II untuk memastikan hasil kajian dapat diintegrasikan dalam proses legislasi dan pengawasan DPR RI. Hasil kajian ini menjadi bahan penting dalam proses pembahasan anggaran yang berhubungan dengan pengendalian inflasi, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif.

Triwulan IV

Di triwulan terakhir, hasil kajian yang telah disusun disebarluaskan kepada 15 Lembaga yang berkepentingan, termasuk Alat Kelengkapan DPR RI, Tim Pengendali Inflasi Pusat, serta Perguruan Tinggi Mitra Badan Keahlian DPR RI. Penyampaian kajian dilakukan melalui *platform* berbasis *data sharing* yang terintegrasi untuk memastikan aksesibilitas yang cepat dan efisien bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian inflasi.

Daftar AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi yang menerima kajian investasi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Komisi II
2. Komisi IV
3. Komisi VI
4. Komisi VIII
5. Komisi X
6. Komisi XI
7. Badan Anggaran
8. BAKN
9. Universitas Indonesia
10. Universitas Gadjah Mada
11. IPB University
12. PKN STAN
13. Universitas Padjajaran
14. Universitas Trisakti
15. Universitas Muhammadiyah Cirebon

Secara keseluruhan, implementasi RB Tematik ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga mendorong kolaborasi erat antara DPR RI, akademisi, dan lembaga-lembaga terkait. Setiap hasil yang dicapai bertujuan memberikan dampak nyata dalam menstabilkan inflasi di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada hasil yang terukur.

4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan melalui pengawasan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan digitalisasi telah diinisiasi oleh Pemerintah sejak adanya Instruksi Presiden No.. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Walaupun setiap tahunnya Indonesia mengalami perbaikan dari segi *E-Government Development Index* (EGDI), peringkat EGDI Indonesia tahun 2022 yang menempati posisi 77 masih di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura (peringkat 12), Malaysia (peringkat 53), Thailand (peringkat 55), dan Brunei Darussalam (peringkat 68). Oleh karenanya, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian terkait hambatan penerapan SPBE pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang berfungsi sebagai instrumen pendukung fungsi pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah terkait proses digitalisasi administrasi pemerintahan. Dalam upaya mendukung pengawasan terkait penerapan SPBE yang menjadi salah satu kebijakan utama digitalisasi administrasi pemerintahan, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Menyusun kajian terkait evaluasi penerapan SPBE oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah beserta hambatan dan peluang digitalisasi pemerintahan; dan
- Menyampaikan hasil kajian terkait evaluasi penerapan SPBE kepada pemangku kepentingan terkait yang mencakup AKD DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Pemerintah Daerah yang menjadi sampel kajian, dan perguruan tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 3. 50 Capaian RB Tematik Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi	Persentase Realisasi
Tersirkulasinya hasil kajian terkait hambatan	Tersampaiannya hasil kajian kepada 15 AKD/Kementeri	15 AKD/ Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	15 AKD/ Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	100%

pelaksanaan SPBE	an/Lembaga/Perguruan Tinggi			
------------------	-----------------------------	--	--	--

RB Tematik dengan fokus pada Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2024, dengan menitikberatkan pada penyusunan kajian yang mendalam terkait hambatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Setiap triwulan ditetapkan target yang jelas dan hasil yang terukur untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi berjalan efektif. Berdasarkan data, seluruh target yang berkaitan dengan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan selama tahun 2024 berhasil dicapai sepenuhnya. Kajian yang dihasilkan telah disampaikan kepada 15 pemangku kepentingan, termasuk Alat Kelengkapan DPR RI, dan Perguruan Tinggi Mitra Badan Keahlian DPR RI. Dengan capaian realisasi 100%, ini menunjukkan bahwa seluruh tujuan tematik dengan fokus pada Digitalisasi Administrasi Pemerintahan berhasil direalisasikan sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Triwulan I

Pada tahap awal, difokuskan pada Pembentukan Tim Penyusun Kajian yang bertugas mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SPBE. Identifikasi terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SPBE merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat maksimal, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih besar.

Triwulan II

Memasuki triwulan kedua, kegiatan berlanjut dengan mengadakan diskusi intensif bersama para pakar dan mitra kerja Badan Keahlian DPR RI. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SPBE. Temuan dari diskusi ini menjadi landasan utama dalam penyusunan kajian awal yang memberikan rekomendasi solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SPBE.

Triwulan III

Pada triwulan ketiga, fokus diarahkan pada finalisasi kajian dengan melakukan analisis yang lebih komprehensif. Tim juga melakukan koordinasi dengan Biro Persidangan I dan II untuk memastikan bahwa hasil kajian dapat disirkulasikan.

Triwulan IV

Di triwulan terakhir, hasil kajian yang telah disusun disebarluaskan kepada 15 lembaga yang berkepentingan, termasuk Alat Kelengkapan DPR RI, dan Perguruan Tinggi Mitra Badan Keahlian DPR RI. Penyampaian kajian dilakukan melalui *platform* berbasis *data sharing* yang terintegrasi untuk memastikan aksesibilitas yang cepat dan efisien bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Daftar AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi yang menerima kajian investasi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Komisi I
2. Komisi II
3. Komisi VI
4. Komisi VII
5. Komisi X
6. Komisi XI
7. Badan Anggaran
8. BAKN
9. Universitas Indonesia
10. Universitas Gadjah Mada
11. IPB University
12. PKN STAN
13. Universitas Padjajaran
14. Universitas Trisakti

5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

DPR RI memiliki peran dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Peran DPR RI dilakukan dalam ranah penggunaan anggaran DPR RI untuk membeli produk dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan upaya penggunaan produk dalam negeri sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan yang mendukung penggunaan produk dalam negeri, kebijakan proteksi terhadap industri dalam negeri, atau kebijakan insentif untuk penggunaan produk dalam negeri;
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan memberikan manfaat bagi industri dalam negeri; dan
- Menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung produksi dalam negeri, seperti anggaran untuk riset dan pengembangan produk dalam negeri atau anggaran untuk pelatihan tenaga kerja.

Tabel 3. 51 Capaian RB Tematik Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi	Persentase Realisasi
Terealisasinya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Tingkat penggunaan produk dalam negeri	40%	74,97%	187,42%

RB Tematik dengan fokus pada penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2024, dengan menitikberatkan pada penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri, serta penyediaan anggaran guna mewujudkan tingkat penggunaan produk dalam negeri minimal sebesar 40% yang konsisten di setiap triwulannya.

Penetapan target setiap triwulan dilakukan guna memastikan pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan efektif dan menghasilkan hasil yang terukur. Per 30 Desember 2024, Rapor Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2024 pada Kementerian/Lembaga yang dirilis LKPP mencatat Transaksi Belanja PDN pada Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar 74,97%. Capaian tersebut mencapai 187,42% dari target yang ditetapkan dalam perencanaan RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari tercapainya setiap tahapan rencana aksi triwulan yang telah disusun pada awal tahun.

Triwulan I

Pada tahap awal, difokuskan pada Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang diberikan tanggung jawab untuk memastikan tercapainya batas minimal Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Triwulan II

Memasuki triwulan kedua, kegiatan berfokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan guna memastikan batas minimal 40% Penggunaan Produk Dalam Negeri konsisten terealisasi akhir Triwulan II. Tujuan tersebut terealisasi, dimana realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Triwulan II sebesar 87,17%.

Triwulan III

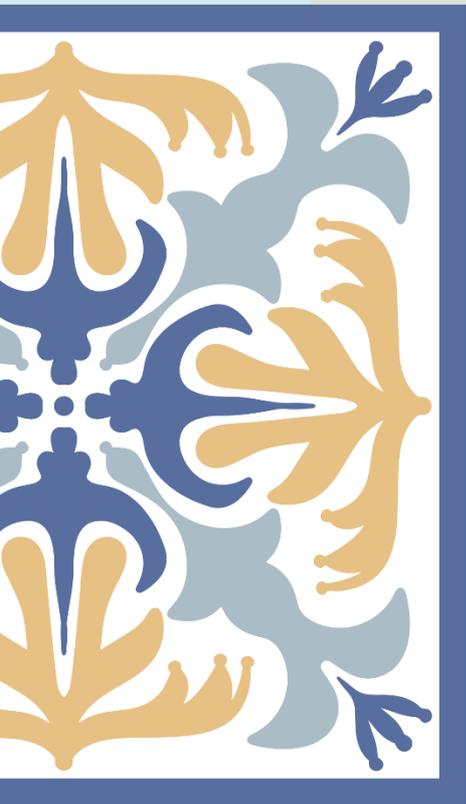
Memasuki triwulan ketiga, kegiatan tetap berfokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan guna memastikan batas minimal 40% Penggunaan



Produk Dalam Negeri konsisten terealisasi akhir Triwulan III. Tujuan tersebut terealisasi, dimana realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Triwulan III sebesar 81,2%.

Triwulan IV

Pada triwulan keempat, kegiatan berfokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan guna memastikan Penggunaan Produk Dalam Negeri sepanjang tahun 2024 minimal 40%. Per 30 Desember 2024, Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI mencapai 74,97% atau setara 187,42% dari target yang ditetapkan dalam perencanaan RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri di awal tahun.



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2024 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai program yang inovatif dan berbasis teknologi. Hal ini selaras dengan visi Reformasi Birokrasi Nasional untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan RB, Sekretariat Jenderal DPR RI konsisten untuk menindaklanjuti saran perbaikan yang masuk, baik dari Kementerian PANRB sebagai evaluator nasional RB, maupun dari Inspektorat Utama sebagai evaluator internal Sekretariat Jenderal DPR RI. Bersamaan dengan itu, Bagian Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pun melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan atas rencana aksi dan bukti dukung untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti kendala teknis dalam implementasi program ataupun infrastruktur pendukung yang belum sepenuhnya optimal. Untuk itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh elemen organisasi serta peningkatan sinergi dan kolaborasi antara Tim Penilai Internal (TPI), Sekretariat RB, dan Penanggung Jawab (PIC). Penyelesaian tantangan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Secara keseluruhan, Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Capaian yang telah diraih menunjukkan progres yang positif menuju birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, reformasi yang dilakukan diyakini akan memberikan kontribusi besar dalam mendukung kinerja DPR RI sebagai lembaga legislatif.

B. Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024:

1. Memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar untuk menyusun Rencana Aksi dan perbaikan ke depan;

2. Mengintensifkan kolaborasi antara Tim Penilai Internal (TPI), Sekretariat Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Penanggung Jawab (PIC);
3. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama dalam memantau pelaksanaan program kerja serta memberikan rekomendasi tindak lanjut secara berkala;
4. Memastikan alokasi anggaran setiap kegiatan utama Reformasi Birokrasi digunakan secara efektif dan efisien;
5. Meningkatkan ketepatan waktu dalam implementasi Rencana Aksi serta dalam pelaporan capaian per Triwulan;
6. Mengintegrasikan sistem informasi yang sudah ada untuk menciptakan *platform* terpadu guna mendukung proses kerja yang lebih efisien.

Dengan pelaksanaan rekomendasi di atas, Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan.



PENGHARGAAN





PENGHARGAAN

- Apresiasi dalam Idea Fest 2024 Kategori Penghargaan Kreatif atas Inovasi Dalam Penyampaian Aspirasi melalui Media Digital;
- Penghargaan dalam Detikcom Awards 2024 sebagai Lembaga Pendukung Berkinerja Tinggi;
- Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif
- Apresiasi oleh INews dalam acara Apresiasi Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik;
- Penghargaan oleh Kementerian PANRB sebagai salah satu dari 10 Lembaga Terbaik dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024;
- Penghargaan *Digital Government Award* dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *Summit 2024* sebagai Penerapan SPBE Terbaik Kategori Lembaga Pemerintah;
- Juara I Pengelolaan Kearsipan Tingkat Nasional Terbaik dengan nilai 96,16 (Sangat Memuaskan);
- Penghargaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas Pencapaian Memenuhi Kelengkapan Atribut pada 9 Variabel (9/9) untuk Mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Prokatif) pada 1 Februari 2024;
- Biro Keuangan, Juara II Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Kelompok I pada BMN Award 2024.



PENGHARGAAN





**BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**